

**KEMITRAAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN UNTUK
MENGISI QUO VADIS PENGENTASAN KEMISKINAN INDONESIA**

Kris Kyantoro

Bagian Hukum SETDA Kota Salatiga
kriskyantoro@yahoo.com/ krismalmsteen@gmail.com

Abstract

The Partnership Model which have been created at the time of the practical activity was designed as an effort to develop local potential and resources in its form an access to the Corporate Social Responsibility (CSR) Program in handling the poverty problem. The local poverty called as artificial poverty that is referred to the poor condition which is caused by internal and external factors. This condition is characterized by lack of income and financial capital of the poor, but they are still having some valuable assets, or they are strong enough to access certain resources for their own capacity building and welfare. The research result was shown that the early model may just include partnership in the social aspect, while the local economic empowerment aspect in the partnership have not optimally achieved. Its limitation was mainly due to the factor of the company program option which over concentrate on social charity activities in their CSR implementation. Limitations of the CSR Program implementation and also weaknesses and improvement needs of the model which led to the economic empowerment aspect and strengthening of the social aspect further are accommodated in the program design that aimed to strengthen the social economic in the three sectors relationships involving community, local government, and company. The model improvement implementation can be a seedbed media for the principles of the partnership. The Partnership Model of Socio-Economic of the Community with Company for Overcoming Poverty is a pattern of partnership which able to increase the social awareness, an entrepreneurship spirits, and the community incomes.

Keywords: artificial poverty, CSR, socio-economic partnership, three sectors

Abstrak

Model Kemitraan yang dikembangkan pada saat kegiatan praktikum didesain sebagai upaya pengembangan potensi dan sumber lokal yang berupa akses pada Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penanganan masalah kemiskinan. Kemiskinan lokal disebut *artificial poverty* yaitu kondisi miskin yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kondisi ini ditandai dengan kekurangan penghasilan dan modal finansial kelompok miskin, namun mereka masih memiliki aset berharga tertentu atau masih dapat mengakses sumber daya tertentu bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Kemitraan (model awal) baru dapat mencakup aspek sosial sedangkan aspek pemberdayaan ekonomi lokal belum optimal tercapai. Keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh faktor pilihan program dari perusahaan yang bersubstansi pada kegiatan-kegiatan derma sosial pada pelaksanaan CSR-nya. Keterbatasan implementasi Program CSR beserta kelemahan dan kebutuhan penyempurnaan model yang bermuara pada aspek pemberdayaan ekonomi dan penguatan aspek sosial selanjutnya diakomodir dalam desain penyempurnaan program yang diarahkan pada penguatan kemitraan sosial ekonomi masyarakat dalam relasi tiga sektor yang melibatkan warga, pemerintah setempat, dan perusahaan. Implementasi penyempurnaan model telah mampu menjadi media persemiaan bagi prinsip-prinsip kemitraan. Model Kemitraan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Perusahaan untuk Mengatasi Kemiskinan (model akhir) merupakan pola kemitraan yang mampu meningkatkan kesadaran sosial, jiwa wirausaha, dan penghasilan masyarakat.

Kata-kata kunci: *artificial poverty, CSR, kemitraan sosial ekonomi, tiga sektor*

Pendahuluan

Realitas menunjukkan bahwa pemerintah selaku pengemban amanat konstitusi belum mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan walaupun telah memberikan porsi perhatian yang besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Upaya serius tersebut dapat tercermin dari meningkatnya anggaran penanganan kemiskinan yang dialokasikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari rentang tahun 2004 - 2010. Pada APBN tahun 2004 anggaran penanganan kemiskinan sebesar 18 triliun dan pada tahun 2010 yang lalu sudah mencapai angka 94 triliun, tetapi faktanya angka kemiskinan belum dapat secara signifikan berkurang. Estimasi atau potensi besaran dana CSR baik dari BUMN maupun perusahaan swasta pada tahun 2010 sebesar 10 triliun, apabila dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang sifatnya sukarela tersebut dapat disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, diharapkan manfaatnya bagi masyarakat akan lebih maksimal. Oleh sebab itu, dengan mengandeng BUMN seperti Bio Farma maupun perusahaan-perusahaan lainnya dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan, diharapkan pemerintah dapat sedikit membagi bebannya kepada dunia usaha.

Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat telah bertransformasi menjadi sebuah "megapolitan baru di sebelah megapolitan Jakarta". Hal tersebut secara umum disebabkan oleh perkembangan kota yang begitu pesat selama 30 tahun terakhir yang menjadikannya sebagai kota multifungsi, yaitu sebagai sentra pemerintahan, pendidikan, wisata, jasa, industri, dan perdagangan. Beriringan dengan perkembangan dan kemajuan pesat tersebut adalah munculnya fenomena kemiskinan perkotaan sebagai dampak ikutan. Angka kemiskinan di Kota Bandung saat ini diukur berdasar data statistik BPS tahun 2010, menunjukkan bahwa jumlah orang miskin sebesar 63.000 orang dari total penduduk sekitar 2,3 juta jiwa (<http://www.suarapembaruan.com>).

Masalah kemiskinan di Kota Bandung berkaitan pula dengan tuntutan atensi, respons, serta pola dan aksi penanganan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dari pemerintah selaku penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat selaku subyek sekaligus obyek pembangunan, dan dunia usaha yang meretas aktivitas bisnisnya di sekitar masyarakat. Pada konteks penanganan masalah kemiskinan di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pemerintah lokal tidak akan sanggup bekerja sendirian. Namun perlu didorong dan didukung pula dengan usaha dari segenap komponen *civil society*.

Kelurahan Tamansari sebagai lokasi praktikum dan penelitian sangat tersohor dengan salah satu wilayahnya, yaitu kawasan multifungsi Cihampelas. Kelurahan Tamansari terkenal pula sebagai salah satu kantong kemiskinan di Kota Bandung. Hal tersebut didukung dengan data mengenai populasi penduduk miskin sebanyak 3.932 jiwa/872 KK (Kepala Keluarga). Angka tersebut adalah angka yang tertinggi di Kecamatan Bandung Wetan, dengan wilayah RW 15 menjadi kantong penduduk miskin, yaitu sebanyak 607 jiwa/122 KK.

Data kuantitatif kemiskinan serta realitas kemiskinan lokal menjadi landasan untuk mengembangkan sebuah model pada saat kegiatan praktikum dan penelitian. Model tersebut berbasis pada pengembangan potensi/sumber lokal yang berupa akses masyarakat terhadap program CSR P.T. Bio Farma. Model tersebut dibingkai dalam kemitraan antara warga dengan P.T. Bio Farma. CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 huruf b yaitu: "tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat". CSR/TSP sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 1 ayat (3) yaitu: "Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Model kemitraan yang dikembangkan pada saat kegiatan praktikum dan disempurnakan dengan penelitian adalah selaras dengan beragam pendapat yang pro CSR sebagai salah satu solusi dalam meretas jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanganan masalah kemiskinan. Pengembangan model kemitraan yang dilakukan oleh penulis beserta seluruh kolaborator model dari tiga sektor (masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha) adalah selaras dengan praktik CSR, saat salah satu bentuk pelaksanaan kegiatannya apabila menurut konsep ideal yaitu mencakup pengembangan relasi kemitraan dengan masyarakat di sekitarnya. Harapan sekaligus tujuan antara dari intervensi model awal yang terdiri atas kegiatan-kegiatan seperti: kunjungan lapangan tahap 1 dan 2, pelatihan/praktik budidaya tanaman ekonomi produktif, pendampingan/monitoring, studi banding, pelatihan UKM (Usaha kecil dan Menengah) dan evaluasi, yaitu untuk meningkatkan kapasitas komunitas miskin dan masyarakat Kelurahan Tamansari pada umumnya. Harapan dan tujuan akhir model kemitraan yaitu untuk mengatasi dan mereduksi kemiskinan. Model yang telah dikembangkan pada kegiatan praktikum tentu saja memiliki kelemahan-kelemahan dalam tahapan-tahapannya seperti: belum terdapat bentuk yang konsisten dalam relasi pendekatan (*engagement*) dari masing-masing pihak yang terlibat dalam model, belum terakomodasinya semua inisiatif dan partisipasi lokal dalam tahap perencanaan model bersama dengan mitra karena asesmen parsial, masih terdapat satu kegiatan dalam model yang belum sempat terlaksana, belum integralnya mekanisme evaluasi keseluruhan rangkaian kegiatan (model), dan belum terakomodasinya

prinsip kemitraan sejati dalam keseluruhan rangkaian kegiatan masyarakat bersama dengan mitra kerjasama (pihak perusahaan). Latar belakang masalah tersebut menjadi pijakan bagi penulis untuk merumuskan problematik penelitian yaitu: "Bagaimana Model Kemitraan Masyarakat dengan P.T. Bio Farma di Kelurahan Tamansari?" Rumusan problematik penelitian tersebut kemudian penulis jabarkan ke dalam sub-sub problematik sebagai berikut: 1) bagaimana profil kemiskinan di Kelurahan Tamansari 2) bagaimana profil CSR P.T. Bio Farma di Kelurahan Tamansari 3) bagaimana gambaran model awal kemitraan masyarakat dengan P.T. Bio Farma yang terdiri dari tahap *engagement*/pendekatan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi (moneva), dan 4) bagaimana penyempurnaan model kemitraan masyarakat dengan P.T. Bio Farma dalam tahap *engagement*/pendekatan, perencanaan, pelaksanaan, dan moneva.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *action research* dengan model kolaboratif. Aplikasinya ditunjukkan dengan melakukan penelitian terhadap model kemitraan yang telah dikembangkan secara partisipatif dan selanjutnya bersama dengan para partisipan kegiatan melakukan penyempurnaan model awal yang telah dilaksanakan dan diteliti sebelumnya. Penulis menggunakan teknik pengambilan partisipan penelitian dan sumber data penelitian lain berdasar pertimbangan dan tujuan tertentu (*purposive sampling*) yang selaras dan relevan dengan penelitian tindakan. Sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah cerita dan perilaku partisipan model, seperti: kelompok warga dalam sesi diskusi curah pendapat, kelompok warga dalam sesi diskusi kelompok terfokus, warga miskin dua orang, seorang pengurus Tim Kerja Masyarakat (TKM), seorang tokoh masyarakat Kelurahan Tamansari, dan seorang petugas CSR P.T. Bio Farma.

Semua partisipan penelitian pada aplikasinya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai profil CSR, model awal, dan

penyempurnaan model melalui wawancara mendalam dan wawancara terstruktur. Untuk memperkaya laporan penelitian, penulis juga memanfaatkan sumber data pendukung (sekunder) yang berasal dari arsip atau dokumen dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan isu-isu kemiskinan, penelitian (khususnya kualitatif dan *action research*), CSR, kemitraan, dokumentasi/ foto kegiatan, data statistik dari Kelurahan Tamansari dan dari P.T. Bio Farma, Laporan Praktikum Penulis, untuk triangulasi. Instrumen utama yang digunakan di dalam penelitian ini adalah peneliti/ penulis sendiri bersama dengan para partisipan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipan (*participant observation*), telaah dokumen/studi literatur, FGD (*focussed group discussion*), dan diskusi curah pendapat (*brainstorming*).

Wawancara mendalam digunakan untuk menjawab sub-sub problematik penelitian tentang profil kemiskinan di Kelurahan Tamansari, profil CSR P.T. Bio Farma di Kelurahan Tamansari, gambaran model awal, dan penyempurnaan model kemitraan masyarakat dengan P.T. Bio Farma. Pada aplikasinya teknik ini digunakan untuk memperoleh kedalaman informasi yang berkaitan dengan sub-sub problematik sebagaimana telah disebutkan, setelah penulis mengaplikasikan diskusi curah pendapat dan diskusi kelompok terfokus dengan substansi yang sama. Wawancara jenis lain yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur yang diaplikasikan untuk mengetahui refleksi para partisipan penelitian setelah diimplementasikannya penyempurnaan model.

Observasi partisipan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan difokuskan terhadap aktivitas partisipan penelitian untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam memperbaiki, menyempurnakan, atau mengembangkan model bersama para partisipan, mengumpulkan basis bagi refleksi model, dan mendapatkan dokumentasi seluruh kegiatan sebagai bahan dukungan laporan

penelitian (sumber informasi sekunder). Pada aplikasinya teknik ini juga dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan fisik dan sosial warga miskin. Teknik ini juga diaplikasikan untuk mengamati dan memotret praktik CSR P.T. Bio Farma di Kelurahan Tamansari. Aplikasi selanjutnya observasi partisipatif selama pelaksanaan pertemuan warga untuk diskusi curah pendapat, diskusi kelompok terfokus, penyusunan rencana perbaikan/penyempurnaan model, dan pelaksanaan perbaikan/penyempurnaan model.

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari Buku Profil Kelurahan Tamansari, Laporan Praktikum Penulis, dan situs P.T. Bio Farma. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh keselarasan data dan harmonisasi analisis terhadap model. Penerapan FGD dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gambaran dan penilaian masyarakat mengenai model awal yang terjabarkan dalam tahapan-tahapan model seperti *engagement/* pendekatan, perencanaan, pelaksanaan, dan moneva, serta penilaian atau refleksi mengenai model dalam aspek kelemahan, kekuatan, kebutuhan perbaikan atau pengembangan, dan potensi serta sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan model. Teknik lain yang digunakan sebagai alat pengumpul data yaitu melalui penerapan teknologi pengembangan masyarakat berupa Klasifikasi Kesejahteraan Sosial dan ToP (*Technology of Participation*). Teknik Klasifikasi Kesejahteraan Sosial sama halnya dengan FGD, pada aplikasinya digunakan untuk membuka jalan bagi pelaksanaan wawancara mendalam yang dimaksudkan untuk menjawab sub problematik penelitian mengenai profil kemiskinan di Kelurahan Tamansari.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Pada aplikasinya, reduksi data dilakukan berkaitan dengan masih campur aduknya data awal/ mentah yang terkumpul dari beragam sumber. Hal tersebut terjadi

karena pada saat dilakukan wawancara seringkali penulis atau partisipan penelitian meloncat-loncat dalam wawancara atau partisipan penelitian memberi banyak informasi selain informasi yang menjadi tujuan substansial. Penulis merasakan bahwa dalam mereduksi data instrumen penelitian menjadi alat pemandu yang sangat membantu untuk dapat merangkum, memilih, dan memilah data mentah menjadi data yang sinkron dengan tujuan penelitian. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan yaitu menyajikan data sebagaimana tertuang dalam tesis dan disarikan dalam artikel ini. Kegiatan terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berikut disajikan alur/kerangka penelitian yang telah dilakukan.



Gambar 1
Ilustrasi Kerangka Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Informasi dari partisipan penelitian mengenai istilah kemiskinan lokal secara umum memberikan eksplanasi bahwa bahasa/symbol untuk istilah miskin di lokasi penelitian adalah *sangsara*. Penulis lebih jauh dapat mencermati bahwa apabila dilihat dari morfologi dan kondisi, walaupun dari pemahaman beberapa partisipan mengenai istilah *sangsara* dan *balangsak* serupa atau sejenis, tetapi realitasnya kedua istilah tersebut sangat jelas perbedaannya. Istilah *sangsara* dapat diartikan sebagai seseorang yang setidaknya masih dalam kondisi *potential*, yang sesuai dengan kegiatan praktikum dan penelitian tindakan yang bertema pengembangan potensi dan sumber masyarakat dijadikan sebagai pelaku

sekaligus penerima manfaat model. Istilah *balangsak* dapat diartikan sebagai seseorang yang sudah atau memang “sengaja” memposisikan dirinya sendiri ke dalam kondisi *impotential*, yang lebih dimungkinkan untuk menjadi sasaran program bantuan atau layanan sosial lain-yang lebih spesifik.

Informasi dari partisipan yang menyamakan istilah miskin dengan tidak layak kehidupannya sangat tepat, tetapi akan menjadi sedikit ambigu dengan sinonim yang harus dibantu dan yang banyak memerlukan bantuan. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan pemahaman partisipan pada realitas bahwa kondisi orang miskin atau kelompok *sangsara* adalah orang/kelompok sosial yang selama ini menjadi penerima manfaat beragam program sosial yang diimplementasikan di Kelurahan Tamansari, seperti Jamkesmas atau Raskin yang secara umum dipandang sebagai bantuan-bantuan yang layak untuk diberikan kepada kelompok miskin. Sinonim-sinonim miskin seperti yang harus dibantu dan yang banyak memerlukan bantuan menjadi ambigu karena dapat ditafsirkan secara umum sebagai kondisi apatis/pasif atau lebih ekstrim lagi dapat ditafsirkan misalnya sebagai kondisi *balangsak*. Pemahaman akan istilah lokal mengenai miskin (*sangsara*) menjadi suatu kebutuhan mutlak dalam memahami karakteristik masyarakat sebagai mitra kerjasama.

Di Indonesia banyak ditemukan indikator pengukuran kemiskinan dari beragam lembaga atau instansi pemerintah yang cenderung dihasilkan dari penelitian di suatu tempat tertentu (umumnya di perdesaan), untuk kemudian tanpa penyesuaian langsung digunakan (digenerasilir) di tempat lain yang jauh berbeda karakteristiknya. Indikator-indikator tersebut sangat baik dan dapat menjadi panduan yang mengarahkan program-program layanan, bantuan, dan pemberdayaan sosial agar tepat sasaran, tetapi hal yang harus diingat bahwa sampai sejauh ini tidak semua item dari masing-masing indikator resmi tersebut cocok untuk mengukur atau menentukan karakteristik miskin di seluruh

tanah air. Indikator kemiskinan lokal di Kelurahan Tamansari dapat diklasifikasikan ke dalam sembilan aspek yaitu: ekonomi, kepemilikan aset, akses terhadap fasilitas umum, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, sosialisasi, pakaian, dan partisipasi kelompok miskin dalam aktivitas sosial.

Aspek ekonomi sebagai indikator kemiskinan telah digunakan hampir di seluruh dunia melalui konsep *World Bank*. Aspek ekonomi di Kelurahan Tamansari juga berkaitan dengan lemahnya status ekonomi yang menandai kondisi miskin warga. Kondisi tersebut ditandai dengan jumlah penghasilan yang kecil, penghasilan yang tidak pasti atau tidak mempunyai penghasilan tetap sama sekali, serta akses kredit finansial hanya kepada rentenir dan arisan-arisan lokal. Ukuran nominal yang pasti tentang kurangnya penghasilan dikemukakan oleh partisipan penelitian, yaitu sebesar Rp. 250.000,- per bulan. Informasi lain menyatakan bahwa banyak warga di Kelurahan Tamansari tidak memiliki pekerjaan tetap atau pekerjaannya serabutan yang secara otomatis membuat penghasilan yang diterimanya juga tidak pasti dan minimalis (fluktuatif). Informasi ini semakin menegaskan bahwa sebenarnya bukan hanya di Kelurahan Tamansari, tetapi hampir di mana pun tempatnya, kondisi miskin seseorang/sekelompok orang lebih mudah dan lazim diukur dengan melihat besarnya penghasilan yang diterima oleh seseorang/sekelompok orang dengan melihat jenis pekerjaannya (indikator kemiskinan dari aspek finansial ekonomi).

Kepemilikan aset berharga seseorang lazim diasumsikan menjadi indikator status atau identitas sosial seseorang, misalnya di pedesaan status sosial "*the have*" ditandai dengan kepemilikan faktor/ alat produksi seperti tanah atau lahan garapan yang sangat luas (tuan tanah/*baron*), sedangkan status sosial "*the have not*" lazim disandang oleh penduduk yang sedikit atau sama sekali tidak memiliki alat-alat produksi kecuali dirinya sendiri (buruh/*labour*). Aspek kepemilikan aset

berharga di perkotaan sebagaimana halnya di lokasi penelitian tidak serupa dengan kasus di wilayah-wilayah pedesaan. Aset berharga di perkotaan lebih berkaitan dengan harta benda yang belum tentu menjadi faktor/alat produksi, tetapi dimungkinkan aset tersebut sangat vital. Jenis kepemilikan aset yang tidak dimiliki warga miskin di Kelurahan Tamansari dan yang menjadi indikator kondisi miskin mereka, sangat beragam.

Aspek tersebut misalnya tidak memiliki mobil atau motor, sehingga sebagai sarana transportasi sehari-hari adalah angkutan umum (jika sedang mempunyai uang), atau cukup dengan berjalan kaki. Jenis yang kedua dan sangat vital yaitu tidak dimilikinya/tidak tercukupinya kebutuhan papan (rumah) sebagai aset yang pokok untuk bernaung dari panas dan hujan, dan lebih jauh lagi untuk secara layak mengakomodasi pengembangan interaksi serta sosialisasi yang utama bagi individu. *Insufficiency* warga miskin akan kepemilikan aset rumah (kebutuhan papan) yang layak tersebut ditunjukkan misalnya dengan mengontrak/kos di kamar murah seharga Rp. 200.000,- s.d Rp. 250.000,- per bulan. Sejatinya dari hasil penelusuran, kontrakan/kamar kos dengan standar yang layak di wilayah tersebut seharga Rp. 600.000,- s.d Rp. 650.000 per bulan.

Akses warga miskin perkotaan terhadap fasilitas umum di sekitar tempat tinggal pada umumnya lebih mudah apabila dibandingkan dengan warga miskin di pedesaan tertinggal atau terpencil. Di Kelurahan Tamansari, warga miskin tidak menemui kendala yang berarti dalam mengakses fasilitas umum yang memberikan layanan sosial dasar seperti Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sekolah, kantor-kantor pemerintahan dari tingkat lokal sampai dengan tingkat provinsi, dan lain-lain. Hal yang unik di Kelurahan Tamansari dan hal itu berkebalikan dengan kondisi masyarakat miskin di wilayah-wilayah pedesaan yaitu terletak pada akses mereka terhadap fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) umum. Di wilayah-wilayah pedesaan yang memiliki sungai atau danau

(*situ*), kebiasaan (budaya) lokal yaitu memanfaatkan sungai atau danau untuk fasilitas MCK umum.

Hal ini bukan berarti warga miskin di wilayah tersebut tidak mampu untuk membuat fasilitas MCK permanen, tetapi dilakukan dengan keyakinan sebagai bentuk kearifan lokal, sebagai sarana interaksi sosial, dan media bagi tumbuh kembangnya modal sosial mereka. Hal yang sangat berbeda dapat ditemukan di Kelurahan Tamansari. Seiring semakin sempitnya lahan permukiman yang dimiliki warga dan mahalnnya harga tanah, warga miskin yang jangkakan untuk membangun rumah, untuk membangun fasilitas MCK sederhana saja belum mampu, akhirnya mereka memanfaatkan fasilitas MCK umum yang jumlahnya sangat terbatas di lokasi tersebut.

Aspek pendidikan dalam konteks sosiologi dianggap sebagai salah satu hal yang paling memungkinkan untuk dapat memindahkan/menaikkan status sosial seseorang secara cepat dalam masyarakat dengan mobilitas sosial terbuka, asumsi ini dilandasi dengan realitas bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ilmu, pengetahuan, dan wawasannya semakin banyak dan kemungkinan untuk dapat mengakses atau menguasai teknologi serta faktor produksi yang ada di sekitarnya akan semakin besar. Aspek pendidikan dalam keluarga yang menandai kondisi sebagai keluarga miskin di lokasi penelitian ditunjukkan dengan anak-anak dalam keluarga miskin yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak bersekolah, atau putus sekolah pada tingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut oleh warga dikemukakan karena ketiadaan biaya penunjang pendidikan bagi anak-anak mereka, walaupun sebagian kecil sudah terfasilitasi dengan Program BOS dan Program BAWAKU Sekolah. Warga menyebutkan bahwa program-program tersebut sangat membantu, tetapi belum bisa mengcover semua biaya kebutuhan penunjang pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga karena ketidakmampuan orang tua murid untuk menutupi biaya-biaya penunjang tersebut, seringkali anak-anak mereka *drop out* pada

tingkat pendidikan SD atau mayoritas pada tingkat pendidikan SMP. Warga juga mengemukakan bahwa keterbatasan dana BOS dari Pemerintah Pusat dan Program BAWAKU Sekolah dari Pemkot Bandung maka program-program tersebut belum maksimal atau belum mampu untuk meng-cover seluruh anak dari keluarga miskin.

Kebutuhan makan merupakan kebutuhan paling hakiki bagi manusia tidak peduli latar belakang ideologinya, apabila kebutuhan ini terganggu atau tidak dapat terpenuhi secara layak dan optimal maka akan dapat dilihat akibatnya pada kondisi individu bersangkutan. Dalam pekerjaan sosial yang mempunyai paradigma *person in situation* dan *person in environment*, kondisi tersebut disebut sebagai *social disfunction*. Pada kontekstualisasinya, *social disfunction* yang dialami oleh warga miskin di Kelurahan Tamansari, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makan ditunjukkan dengan informasi yang mengemukakan bahwa aspek pemenuhan kebutuhan (paling) pokok yang dapat mengindikasikan sebuah keluarga sebagai keluarga dengan status miskin, dapat dilihat dari pola makan sehari-hari mereka. Keluarga miskin hanya makan seadanya atau secukupnya. Hal ini diakibatkan oleh kekurangan atau ketidakmampuan secara finansial untuk dapat membeli bahan makanan yang layak konsumsi dan sesuai dengan standar umum. Seringkali keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan makan dengan jalan diberi oleh orang lain/tetangga terdekat yang iba terhadap kondisi mereka. Saat diperdalam bagaimana gambaran makan seadanya atau secukupnya tersebut, disebutkan oleh warga miskin bahwa makan seadanya atau secukupnya berarti makan satu atau dua kali dalam sehari dengan lauk seadanya, yang penting dapat mengenyangkan perut mereka.

Penulis meyakini bahwa disamping pangan, papan, dan sandang, kesehatan merupakan kebutuhan fundamental manusia selanjutnya yang harus tersedia atau terpenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan sosial. Warga miskin di

Kelurahan Tamansari tidak mengalami kendala yang berarti dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan sekitar mereka, seperti Puskesmas atau RSUD. Hal tersebut dimungkinkan dengan kepemilikan kartu Jamkesmas atau pengurusan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), tetapi akses tersebut hanya terbatas pada pemeriksaan atau pengobatan ringan.

Untuk biaya pengobatan tingkat sedang (operasi) dan berat (bedah, operasi berat) serta obat-obatan mereka masih harus mengeluarkan biaya ekstra sebagaimana pasien-pasien lainnya. Warga lebih lanjut menuturkan aspek kesehatan lainnya dari warga miskin ditandai dengan situasi sakit mereka yang diupayakan pengobatan atau kesembuhan awalnya dengan membeli obat-obat ringan (murahan) di warung terlebih dahulu. Jika kondisi mereka belum membaik, warga miskin berinisiatif pergi ke Puskesmas atau ke RSUD dengan berbekal kartu Jamkesmas atau SKTM. Pola tindakan warga miskin dalam mengakses pertolongan medis tersebut berbeda dengan pola warga kelas menengah dan atas yang langsung melakukan akses ke Puskesmas dan dokter pribadi/dokter spesialis.

Berkumpul dan bersosialisasi untuk membentuk masyarakat sebagai media kegiatan produksi dan distribusi bagi konsumsi anggota masyarakat selain gen bawaan manusia (*herediter*) pada masa sekarang sudah menjadi *trend*. Aspek sosialisasi yang menjadi *trend* telah melahirkan beragam fenomena sosial, dalam asumsi penulis, teori *the culture of poverty* milik Oscar Lewis yang didasari penelitian terhadap keluarga-keluarga miskin di Meksiko untuk mendapatkan deskripsi utuh mengenai kebiasaan, pola pergaulan, dan jaringan- keluarga miskin mengantarkan pada simpulan bahwa aspek perkumpulan, pergaulan, atau sosialisasi keluarga-keluarga miskin yang dia teliti telah banyak mendorong keluarga-keluarga miskin tersebut tetap terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Aspek sosialisasi warga miskin di Kelurahan Tamansari merupakan antitesis dari teori Oscar Lewis, sebab dari hasil penelitian diperoleh

informasi dari peserta kegiatan bahwa warga miskin mau bergaul dengan warga dari kelompok mana pun, bukan hanya sebatas dengan kelompok sejenis (miskin). Mereka berpendapat bahwa dengan bergaul dengan semua lapisan sosial kesempatan/peluang untuk mendapatkan bantuan atau pekerjaan seadanya dari warga lain akan lebih terbuka. Hal tersebut menjadi kekhususan dan sebuah potensi tersendiri bagi warga miskin, mengingat rasa percaya diri akan menjadi modal yang sangat berharga dalam upaya mereka untuk dapat mentas/keluar dari kondisi miskin.

Manusia di era permulaan hanya menutup aurat dengan daun sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai estetika. Pada jaman prasejarah budaya berpakaian mulai berkembang, selain untuk memenuhi unsur estetis, juga untuk mempertahankan diri cuaca ekstrem (kebutuhan primer). Pada abad modern, pemenuhan kebutuhan sandang (berpakaian) bukan hanya untuk memenuhi unsur estetis atau mempertahankan diri dari cuaca ekstrem, tetapi telah lebih jauh menjadi penanda status sosial. Hal ini dilandasi dengan realitas bahwa pada saat ini khususnya di perkotaan seperti di lokasi penelitian, pemenuhan kebutuhan sandang telah mengalami perkembangan dari fungsi awalnya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut mulai berkembang dari sebatas pemenuhan kebutuhan pokok menjadi fenomena sosial baru, misalnya sebagai gaya hidup, penanda status sosial, atau bahkan lebih jauh digunakan sebagai cara untuk memberikan stigma tertentu pada kelompok sosial tertentu. Aspek berpakaian atau cara dan tempat membeli pakaian oleh warga miskin di Kelurahan Tamansari tidak terlepas dari fenomena tersebut. Representasi masyarakat setempat mengemukakan karakteristik warga miskin dengan dilandasi asumsi tersebut, mereka menyebutkan bahwa dengan berpakaian sangat sederhana, murahan, bekas, diberi orang lain dan jika mampu membeli pakaian baru hanya yang dijual di emperan toko, PKL (Pedagang Kali Lima) dan PKL lainnya di Lapangan

Gasibu Kota Bandung, menjadi penanda kemiskinan warga.

Rezim orde baru di Indonesia ditumbangkan dengan semangat reformasi, yang diagungkan karena memberikan penghormatan sejati kepada demokrasi (*from, by, and for the people*), adapun demokrasi yang sejati dibangun oleh partisipasi aktif dari segenap konstituennya. Selaras dengan pengantar penulis tersebut, praktik pekerjaan sosial komunitas dengan kelompok miskin tidak akan pernah terlepas dari prinsip demokrasi dan partisipasi aktif dari kelompok sasaran dalam mereformasi kondisi kebelum beruntungan mereka menuju kondisi yang lebih baik. Aspek partisipasi dari warga miskin dan segenap elemen masyarakat di lokasi penelitian dengan segala keterbatasan dan kekurangannya telah semaksimal mungkin digali dan dimobilisasi sedemikian rupa untuk mencapai keberhasilan kegiatan pengembangan masyarakat setempat. Hal tersebut telah dapat dilakukan setelah penulis menemukan bahwa karakteristik warga miskin di Kelurahan Tamansari dalam kegiatan-kegiatan masyarakat memiliki kekhususan dan potensi tersendiri yang didukung dengan informasi yang menyebutkan bahwa warga miskin sangat mudah digerakkan partisipasinya dalam kegiatan masyarakat, apalagi dalam kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan kepentingan mereka sebagaimana telah dilakukan oleh penulis bersama masyarakat dan mitra kerja sama (P.T. Bio Farma). Mereka beralasan bahwa dengan berpartisipasi akan dapat menunjukkan peran mereka sebagai sesama warga yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara, jika ada semburat keberhasilan pelaksanaan program (model) dalam kegiatan praktikum yang dilanjutkan dengan penelitian tindakan ini, penulis berani mengklaim bahwa itu merupakan keberhasilan warga miskin yang telah mulai terakomodasi dan termobilisasi partisipasi aktifnya.

Semua uraian di atas dapat dimaknai sebagai kebutuhan akan adanya suatu indikator kemiskinan nasional yang dapat dipadupadankan dengan indikator lokal untuk mengakomodasi karakteristik kemiskinan

lokal, khususnya dalam konteks kegiatan praktikum dan penelitian tindakan ini maupun pada kegiatan pengembangan masyarakat di tempat lain yang sejenis. Tidak berlebihan apabila di dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal indikator kemiskinan setempat dapat digali, dikembangkan, dan dikombinasikan dengan indikator kemiskinan resmi/nasional. Keduanya akan dapat saling melengkapi, meminimalisasi konflik horizontal, dan mereduksi kegagalan program atau model yang diimplementasikan bersama dengan masyarakat atau mitra kerjasama.

Kemiskinan di beragam tempat dapat disebabkan oleh beragam hal yang berbeda, tetapi dalam keberagaman tersebut penulis meyakini satu hal yaitu: tidak akan pernah ada penyebab tunggal dari kondisi miskin seseorang atau masyarakat. Pandangan ini penulis promosikan dengan kesadaran bahwa selama ini masih banyak ditemukan kegagalan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang diakibatkan oleh kekurangtepatan analisis program sosial di dalam menganalisis sebab utama dari masalah yang dihadapi. Tidak jarang program hanya ditujukan untuk mengatasi sebab masalah yang diasumsikan sebagai sebab utama, padahal ada sebab lain yang merupakan sebab paling pokok. Pendekatan analisa sebab kemiskinan lokal yang lebih rasional dan langsung dapat dipraktikkan oleh banyak pihak sebagaimana telah dilakukan di lokasi penelitian, yaitu asesmen kebutuhan dan potensi lokal serta harmonisasi dan pengkombinasian program sosial bagi masyarakat miskin. Pendekatan tersebut pada hakikatnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi (daya beli) dan pengurangan angka kemiskinan.

Penulis mengelompokkan sebab kemiskinan lokal menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: malas untuk melamar/mencari pekerjaan atau malas untuk berusaha, sedang menganggur/ terkena PHK, pekerjaannya serabutan, pendidikan kurang/tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan instansi tertentu, kurangnya wawasan,

pengetahuan, dan jaringan, dan tidak ada modal uang untuk memulai usaha ekonomi produktif tertentu. Kelima faktor internal tersebut diasumsikan dapat ter-cover dengan program pengembangan atau pemberdayaan sosial melalui payung Program Kemitraan yang telah dirintis pada saat kegiatan praktikum dan disempurnakan pada kegiatan penelitian. Sebab internal kondisi miskin warga yang bersumber dari kondisi fisik yang kurang/sudah tidak memungkinkan lagi untuk berusaha atau bekerja, seperti mengalami kecacatan sejak kecil dan jompo/tidak produktif, oleh TKM telah diupayakan untuk dihubungkan atau dirujuk dengan layanan/bantuan sosial yang dikoordinasi oleh kader setempat. Hasil *outreach* tersebut yaitu pemberian santunan sosial dari Dinas Sosial dan Pemkot Bandung kepada lansia/jompo dan penyandang cacat setempat.

Faktor eksternal yang secara langsung dan tidak langsung menyebabkan kemiskinan antara lain: kebijakan mikro ekonomi yang tidak berpihak warga miskin, misalnya pembangunan *mall* di lingkungan sekitar yang mematikan sektor informal warga setempat, jerat hutang dari rentenir, distribusi aset yang tidak berpihak kepada warga miskin, tidak ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, dan tidak adanya supervisi serta keberlanjutan (*sustainability*) dari program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan/pengembangan masyarakat yang selama ini pernah diimplementasikan di Kelurahan Tamansari. Sebab internal yang pertama tidak mampu disentuh oleh penulis dan warga, tetapi sebab selanjutnya telah sedikit banyak disasar dengan rintisan Program Kemitraan. Sebab internal dan eksternal telah diupayakan pengatasannya melalui pendekatan keilmuan pekerjaan sosial komunitas yang mengkombinasikan beragam perspektif keilmuan. Terlepas dari segala kekurangannya, sekali lagi penulis mengemukakan pendapat bahwa meskipun kemiskinan akan selalu berpasangan dengan kemakmuran, tetapi pada aras makro dan mezzo sebagaimana area praktik penulis, upaya- pengatasan kemiskinan dan pemandirian masyarakat dengan dilandasi

niat baik, koordinasi terpadu, dan pengintegrasian segenap potensi dan sumber harus tetap diapungkan.

Kemiskinan jika diibaratkan seorang aktor adalah “Jhony Deep”. Kemiskinan jika diibaratkan tokoh pewayangan Jawa (*Wayang Purwo*) adalah “Dasamuka”. Kedua analogi tersebut sesungguhnya berarti bahwa kemiskinan mempunyai banyak rupa serta bersifat kompleks dan multidimensional. Menurut penulis, tidak akan ada sebuah teori yang benar-benar dapat menentukan suatu jenis kemiskinan masyarakat, yang ada adalah teori-teori yang memotret suatu jenis kemiskinan dari satu perspektif, misalnya Oscar Lewis yang memotret kemiskinan dari perspektif budaya individual/keluarga miskin (internal), atau Bank Dunia yang memotret kemiskinan dari perspektif ekonomi makro (eksternal).

Semua uraian tersebut melandasi penulis untuk mensintesis jenis kemiskinan di Kelurahan Tamansari yang hampir identik dengan *vulnerable* dan *poor* menurut perspektif pekerjaan sosial, tetapi berdasar realitas di lapangan, kondisi *vulnerable* dan *poor* tersebut saling tumpang tindih sehingga sangat sulit berada dalam salah satu kondisi saja, sehingga sebagai kombinasi dari kedua kondisi tersebut dapat diistilahkan bahwa jenis kemiskinan di Kelurahan Tamansari adalah “*artificial poverty*” atau kemiskinan palsu/semu. Pendapat tersebut juga dilandasi dengan perspektif kekuatan (*strength perspective*) yang melihat bahwa pasti ada sekecil atau seminimal apapun potensi atau sumber yang ada atau melekat pada diri individu/masyarakat miskin yang dapat digali dan didayagunakan untuk peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan kesejahteraan mereka. Kemiskinan semu dengan kata lain adalah suatu kondisi miskin yang masih dapat diusahakan pengatasannya dengan cukup mudah melalui pemanfaatan potensi dan sumber di sekitar si miskin. Lebih lanjut jenis kemiskinan semu tersebut ditandai dengan empat hal pokok, yaitu ketidakmenentuan pendapatan, lingkungan fisik dan kepemilikan aset, asumsi lokal, dan faktor buatan manusia.

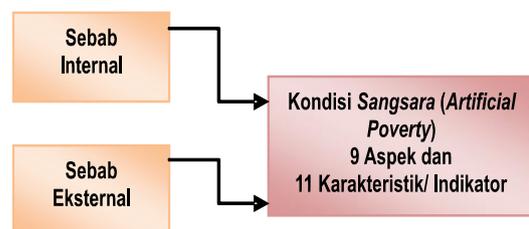
Ketidakmenentuan pendapatan sebagai akibat dari siklus sosial ekonomi yang fluktuatif telah mengakibatkan banyak warga yang *jamila* (jatuh miskin lagi) karena mengalami Pemutusan Hubungan Kerja/PHK atau sedang menganggur. Namun apabila warga sudah dapat bekerja kembali/sedang tidak menganggur maka perekonomian mereka akan kembali pulih seiring dengan kembalinya pendapatan/penghasilan mereka yang sebelumnya hilang. Kondisi ini dialami oleh mayoritas anak-anak muda di Kelurahan Tamansari yang berprofesi sebagai tukang potret musiman dan warga yang berprofesi sebagai buruh serabutan.

Lingkungan fisik, khususnya yang berkaitan dengan kondisi perumahan warga miskin telah mengindikasikan pada ketidakpastian/kekurangakuratan aspek perumahan apabila dijadikan sebagai indikator tunggal bagi kemiskinan mereka. Hal ini berkaitan dengan belum adanya standar yang pasti tentang bagaimana kondisi dan ukuran fisik rumah yang dianggap sebagai rumah warga miskin perkotaan. Kepemilikan aset atau benda berharga seperti motor, televisi, dan perabot rumah tangga yang lain turut membingungkan, sebab di lapangan banyak sekali ditemukan benda-benda tersebut dimiliki pula oleh warga miskin. Lingkungan fisik/ rumah yang kompleks dan sulit dijadikan sebagai indikator kemiskinan dan kepemilikan aset/benda berharga yang dianggap bukan lagi sebagai barang mewah, sementara di tempat lain masih dianggap sebagai barang mewah, membuat kondisi kemiskinan warga diasumsikan sebagai kemiskinan semu.

Asumsi lokal mengenai kondisi miskin setempat yang belum tentu diasumsikan sama di tempat lain membuat jenis kemiskinan lokal juga menjadi bias (semu). Kemiskinan dan asumsi kondisi miskin mereka tentu saja berbeda dengan di tempat-tempat lain. Warga lebih suka dan lebih mudah mendeskripsikan kondisi kemiskinan mereka dengan indikator kepemilikan Kartu Raskin dan Jamkesmas, padahal menurut keterangan mereka, banyak

pula warga dari kalangan mampu/berada yang memiliki/meminta kartu yang sama. Hal ini tentu saja mempertegas bias (semu) kondisi atau jenis kemiskinan mereka.

Faktor buatan manusia pada kontekstualisasinya misalnya berupa kebijakan ekonomi makro yang tidak berpihak kepada rakyat dan sektor ekonomi mikro/sektor ekonomi informal. Kebijakan tersebut lebih berpihak kepada korporat dan kaum pemilik modal raksasa (*neoliberal capitalism*) dan diperparah dengan distribusi aset produksi yang tidak merata (monopoli), korupsi dan kolusi yang menggurita, tatanan ekonomi dunia yang dianggap baik bagi negara-negara maju tetapi tidak tepat apabila diterapkan di negara-negara miskin seperti Indonesia (misalnya kebijakan perdagangan bebas). Pada kontekstualisasi yang lebih spesifik tentu saja telah disebutkan sebelumnya mengenai pembangunan *mall* di sekitar Kelurahan Tamansari yang diindikasikan telah mengepung dan mematikan usaha kecil dan sektor-sektor informal warga lokal. Semua hal tersebut baik langsung maupun tidak, baik sengaja maupun tidak, telah memperburuk kehidupan sosial ekonomi warga lokal. Kondisi ini diasumsikan sebagai faktor pendorong bagi kemiskinan semu warga, dengan asumsi bahwa apabila faktor-faktor buatan manusia (kebijakan) tersebut segera direvisi maka determinan kemiskinan semu akan dapat berubah dan diharapkan dapat mempromosikan kesejahteraan warga. Secara umum berikut ini merupakan ilustrasi dari kondisi kemiskinan semu tersebut.



Gambar 2
Ilustrasi Kondisi Sangsara di Kelurahan Tamansari

Ilustrasi gambar 2 dapat diterjemahkan pada pemahaman bahwa kemiskinan di Kelurahan Tamansari disebut sebagai kondisi sangsara. Kondisi sangsara tersebut mencakup sembilan aspek kehidupan sosial ekonomi dan memiliki 11 karakteristik/ ciri-ciri. Pada konteks kausalitas, kondisi sangsara merupakan suatu kondisi yang didorong oleh faktor internal dan eksternal yang sangat kompleks sehingga pada akhirnya membuat jenis kemiskinan setempat menjadi agak bias (semu).

Kondisi kemiskinan lokal tersebut diupayakan penanganannya dengan mengembangkan relasi dan model kemitraan yang termediasi oleh praktik CSR P.T. Bio Farma. Sejatinnya perusahaan bersangkutan mempunyai dasar hukum dan mandat yang sangat kuat dalam mengimplementasikan kepedulian/tanggung jawab sosialnya dengan tiga produk hukum sekaligus, yaitu: UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengakomodirasi tentang implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSP/CSR) serta Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007 yang mengatur tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), tetapi pada praktiknya sebagai BUMN, perusahaan lebih memilih CSR dan bukan PKBL sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosialnya. Model kemitraan yang mulai dirintis pada saat kegiatan praktikum tahun 2011 adalah sebuah model yang masih hijau (embrio). Meskipun di tempat lain model kemitraan bukan model yang benar-benar baru, tetapi model-model kerjasama semacam ini perlu terus ditumbuhkembangkan untuk dapat memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Informasi mengenai tujuh bidang CSR yang diimplementasikan oleh P.T. Bio Farma yaitu Agama, Seni dan Budaya, Lingkungan Hidup dan Sosial, Olah Raga, Pendidikan, Kesehatan, dan Usaha yang disinergikan dengan Tujuh Program Prioritas Pemerintah Kota Bandung merupakan realitas yang patut mendapatkan apresiasi lebih dan dapat dimaknai sebagai pengintegrasian peran dari beragam sektor

untuk melayani masyarakat dan membantu mengentaskan mereka dari kemiskinan. Hal lain yang layak dicermati yaitu pada pengkombinasian pelaksanaan kegiatan CSR bidang lingkungan hidup dan sosial yang pada akhirnya menurut penulis, membuat Program CSR perusahaan mengarah pada kegiatan yang bersifat *charity*. Dalam kaitannya dengan PKBL, kegiatan kedermawanan sosial merupakan kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan program Bina Lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007 yang berbunyi: "Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN". Kombinasi kegiatan itu pula yang akhirnya dipersepsikan oleh warga sebagai satu kesatuan bidang kegiatan dalam CSR bidang lingkungan hidup dan sosial. Penulis sebenarnya merasakan suatu ambiguitas pada pelaksanaan PKBL dan CSR P.T. Bio Farma sebagai bentuk kepedulian/tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan.

Hal tersebut didasari oleh informasi dari perusahaan yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2010 pihak perusahaan melaksanakan CSR sebagai respons dan mandat UU No. 40 Tahun 2007. Perusahaan berargumentasi bahwa PKBL tidak dapat serta merta dilaksanakan, untuk simplisitas pelaksanaan mereka lebih memilih melaksanakan CSR. Penulis merasakan bahwa alasan perusahaan bukan terletak pada simplisitas program, tetapi terjadi karena tiga hal. Hal yang pertama yaitu cenderung bertumpang tindihnya pelaksanaan Program CSR dengan PKBL yang dapat dilihat dari kegiatan CSR bidang lingkungan hidup yang dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan kedermawanan sosial yang merupakan bagian dari Program Bina Lingkungan (BL) dalam PKBL seperti pengadaan pasar murah (bazar sembako). Karena sudah terlanjur bercampur, maka selanjutnya perusahaan merasa lebih mudah untuk melaksanakannya, padahal apabila dicermati lebih lanjut, penulis dapat

menunjukkan bahwa alasan utamanya adalah terletak pada "perusahaan tidak mau repot".

Argumen tersebut didasari dengan fakta bahwa dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007 yang mengatur tentang pelaksanaan PKBL, perusahaan disyaratkan untuk mengelola dana, menyusun laporan keuangan kegiatan PKBL yang terpisah dari perusahaan, dan diaudit kegiatannya oleh auditor internal dan eksternal, termasuk melaporkannya kepada Menteri BUMN selaku *shareholder* atau melaporkannya dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Di dalam UU No. 25 tahun 2007 dan di dalam UU No. 40 tahun 2007 yang mengakomodasi tentang kepedulian atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TSP/ CSR) hal yang merepotkan tersebut tidak diatur, sehingga sangat beralasan bagi perusahaan untuk lebih memilih melaksanakan Program CSR daripada PKBL. Simplitas oleh perusahaan dapat diartikan selain tidak mau repot, juga tidak mau bertanggung jawab secara normatif dan keuangan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007.

Penulis berpendapat dalam pemaknaan yang lain, bahwa perusahaan lebih memilih untuk melakukan kegiatan *hit and run* atau *kiss and run* yang ditandai dengan tindakan perusahaan melaksanakan Program CSR dengan beberapa kegiatan yang kental bernuansa derma sosial. Penulis meyakini bahwa sejatinya CSR dapat dijadikan sebagai program pembuka bagi kemitraan yang sesungguhnya sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007, karena dalam peraturan ini Program Bina Lingkungan (BL) konsepnya merupakan bantuan langsung sepenuhnya (*charity*) atau identik dengan Program CSR. Program Kemitraan (PK) lebih lanjut selaras dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007 merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. Program Kemitraan (PK) merupakan program yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha skala mikro dan kecil, atau diarahkan bagi kelompok

masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*economically active poor*). Maksud penulis tidak salah CSR dan Program BL ditumpangtindihkan sedemikian rupa, karena pada kenyataannya memang identik. Namun setelah masyarakat dapat diambil hatinya dengan derma sosial, komunikasi, relasi, dan kerjasama dengan perusahaan mulai erat terjalin, serta masyarakat mulai berdaya, selanjutnya PK yang masuk atau diimplementasikan pada masyarakat agar kemandirian usaha dan ekonomi masyarakat benar-benar dapat tercapai, singkatnya CSR atau BL adalah pembuka jalan bagi PK yang akan memandirikan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Hal kedua yang berkaitan dengan alasan pemilihan fokus program CSR oleh perusahaan bersangkutan dan bukan PKBL secara utuh untuk dilaksanakan di masyarakat dapat terjadi karena berkaitan dengan pendanaan atau penganggaran program. BUMN seperti Bio Farma selain menjalankan Program CSR (seharusnya) juga menjalankan PKBL karena secara yuridis Bio Farma terikat dengan ketiga aturan sebagaimana telah disebutkan. Perbedaan paling mudah dari ketiga produk hukum tersebut terletak pada pengalokasian anggaran atau dana kegiatan. Penulis mencermati bahwa baik UU No. 25 tahun 2007 dan UU No. 40 tahun 2007 belum mengatur secara jelas besaran dana yang harus dialokasikan oleh perusahaan untuk mendanai Program CSR, sedangkan Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007 secara jelas telah mengatur tentang besaran dana yang harus dialokasikan oleh perusahaan untuk mendanai Program PKBL, yaitu maksimal sebesar 2 % setelah pajak.

Hal ketiga yang dapat melandasi pemilihan fokus program CSR oleh Bio Farma dan bukan PKBL seutuhnya untuk dilaksanakan di masyarakat dapat terjadi karena faktor belum terciptanya *trust* yang mendalam dengan warga. Perusahaan tidak/belum berani untuk menjalin kemitraan sejati (kemitraan pemberdayaan usaha/ekonomi) karena mungkin melihat pada kegagalan perusahaan

lain, program sosial seperti KUBE, dan sejenisnya yang banyak menemui kendala wanprestasi (ingkar janji) dari masyarakat selaku kreditur (penerima pinjaman modal). Pendanaan Program CSR P.T. Bio Farma masih "gelap" dan semakin tertutup oleh UU No. 25 tahun 2007 dan UU No. 40 tahun 2007 yang tidak mengatur secara jelas besaran dana yang harus dialokasikan oleh perusahaan untuk mendanai Program CSR. Menurut penulis, celah hukum ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan dengan lebih memilih mengimplementasikan Program CSR daripada PKBL. Dana untuk Program CSR merupakan beban korporasi (*expenses*), sedangkan dana PKBL merupakan beban pemegang saham (*share holders*), karena memang diambil dari laba bersih korporasi yang hendak dibagikan kepada para deviden dan besaran dana alokasinya sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007.

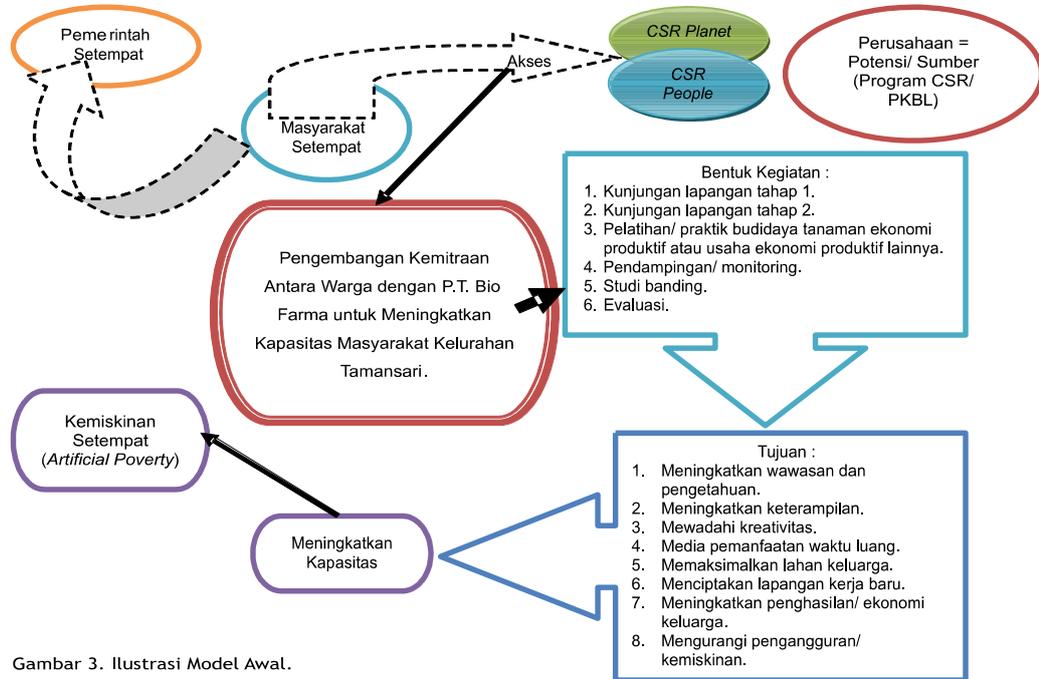
"Tindakan kecurangan" P.T. Biofarma dengan lebih memilih melaksanakan Program CSR daripada PKBL dapat ditunjukkan dengan data dari website perusahaan yang bersangkutan (<http://www.biofarma.co.id>). Dalam laman elektronik tersebut Direktur Utama Bio Farma saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR menyebutkan bahwa: "P.T. Bio Farma (Persero) mencatatkan laba bersih sepanjang tahun 2010 sebesar Rp 246,6 miliar, naik sekitar Rp 28,9 miliar atau 13,3 % dibanding tahun sebelumnya, untuk tahun lalu (2009) sekitar Rp 217,7 miliar". Penulis mengajak pembaca untuk menghitung berapa "dana yang jujur" yang seharusnya dialokasikan oleh Bio Farma jika perusahaan tersebut memilih untuk melaksanakan PKBL, dan bukan Program CSR dengan "dana yang gelap" karena tidak diatur hukum positif sehingga pengalokasiannya dapat ditafsirkan sekedarnya atau "*suka-suka gue*" oleh perusahaan. Perusahaan tersebut apabila taat pada Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007 yang telah secara jelas telah mengatur tentang besaran dana yang harus dialokasikan oleh perusahaan untuk mendanai Program PKBL, yaitu maksimal 2 % setelah pajak, seharusnya pada tahun 2010

perusahaan tersebut dapat mengalokasikan dana maksimal 4,354 miliar dan pada tahun 2011 maksimal 4,932 miliar atau hampir 5 miliar.

P.T. Bio Farma secara umum juga belum mampu memenuhi prinsip bagi sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR secara maksimal, bahkan apabila hal tersebut dinilai dengan konsep Elkington yang minimalis sekalipun (*triple bottom lines*). Penilaian penulis dilandasi dengan realitas bahwa perencanaan umum (*grand design*) Program CSR P.T Biofarma, alokasi atau penganggaran program, dan *moneva*-nya dilakukan sendiri secara internal oleh perusahaan. Realitas lainnya dari aspek ekonomi yang menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengimplementasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara maksimal disebabkan pilihan programnya adalah CSR, bukan PKBL. Kenyataan bahwa pelaksanaan seluruh Program CSR P.T. Bio Farma dilaksanakan sendiri oleh P.T. Bio Farma atau pun dibantu oleh pihak ketiga dan masyarakat setempat yang menjadi penerima sasaran program melalui kolaborasi kegiatan sebagaimana telah dilakukan dalam model awal kemitraan, belum mampu menaikkan penilaian penulis terhadap belum maksimalnya implementasi Program CSR perusahaan tersebut dalam mengakomodirasi prinsip CSR, khususnya yang berkaitan dengan aspek kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*) bagi masyarakat di sekitarnya, artinya perusahaan masih menjadi "kaya sendirian". Perusahaan hanya mampu mengakomodasi prinsip implementasi CSR dari aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup (*environment equality*) yang ditunjukkan dengan beragam kegiatan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di berbagai wilayah, perusahaan juga baru mampu sedikit mengakomodasi prinsip implementasi CSR dari aspek keadilan sosial (*social justice*) dengan kegiatan-kegiatan derma sosialnya. Perusahaan ini juga sama sekali tidak mampu, atau bahkan dengan sengaja menghindari prinsip *procedural* (taat aturan, taat azas) dengan kenyataan tidak melaksanakan PKBL

tetapi memilih melaksanakan CSR. Namun perusahaan ini bagaimana pun juga telah mencoba menjadi BUMN yang “baik” (*good boy*) dengan mengimplementasikan CSR dengan segala kekurangannya. Komunikasi,

dan relasi serta memformulasikan hipotesis pendahuluan bagi suatu masalah/kebutuhan tertentu. Pada konteks *community development, engagement/* pendekatan dapat dianalogikan sebagai *social preparation* yang dapat penulis



Gambar 3. Ilustrasi Model Awal.

relasi, kerja sama, dan pembinaan pada masyarakat selama model dilaksanakan dan disempurnakan melalui kegiatan penelitian ini setidaknya dapat menjadi nilai positif bagi perusahaan. Di mata penulis dengan hal tersebut perusahaan telah cukup mampu mengakomodasi prinsip praktis CSR lainnya, yaitu keberlanjutan (*sustainability*).

Nilai positif tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan model yang secara umum tersusun dalam empat tahapan utama yang diteliti, yaitu *engagement*/pendekatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Fase *engagement*/pendekatan dalam konteks pekerjaan sosial generalis dapat dipahami sebagai keterlibatan seseorang dalam situasi tertentu untuk menciptakan komunikasi

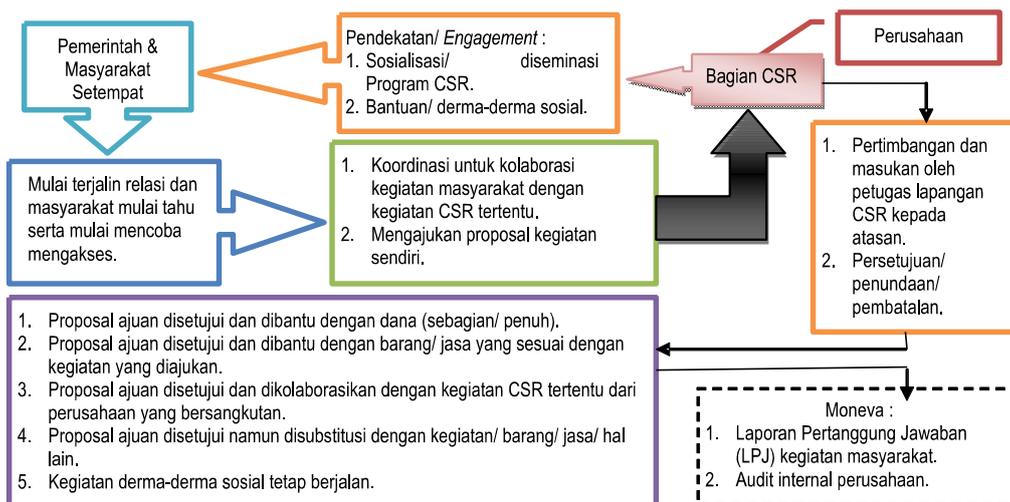
pahami secara umum sebagai keterlibatan awal dari pihak-pihak calon mitra kerjasama dalam jalinan komunikasi dan relasi permulaan, misalnya antara pengembang masyarakat dan masyarakat, pengembang masyarakat dan dunia usaha, masyarakat dan dunia usaha atau sebaliknya, dalam situasi dan kondisi formal atau informal yang secara sadar diciptakan untuk dapat dijadikan sebagai media komunikasi dan relasi yang lebih dalam yang dapat memfasilitasi kepentingan, harapan, dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama. Berikut gambar 3 adalah ilustrasi model awal yang dikembangkan pada saat penelitian praktikum berlangsung.

Gambar 3 merupakan proses penyusunan atau proses perintisan model awal yang diinisiasi oleh penulis bersama masyarakat saat kegiatan praktikum. Rencana kegiatan sebagai respons atau hasil asesmen dan telah tersusun dikonsultasikan kepada pemerintah setempat (Lurah) dan dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan beragam kegiatan yang ada pada system sumber, yakni praktik CSR P.T. Bio Farma, khususnya praktik CSR Bidang Lingkungan dan Sosial. Koordinasi dan integrasi tersebut menghasilkan bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan dan diarahkan pada peningkatan kapasitas kelompok miskin, khususnya kapasitas wawasan, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Tujuan model awal merupakan tujuan antara bagi pencapaian tujuan akhir model, yakni mengatasi kemiskinan. Berikut adalah ilustrasi mengenai alur (prosedur) pemanfaatan dana

CSR dalam model awal.

Adapun gambar 4 dibawah ini

memberikan informasi perihal alur atau mekanisme dana Program CSR yang berdasar atas inisiatif dari perusahaan. Sebagaimana halnya di lokasi penelitian, alur dana CSR model ini lazim dibuka oleh pihak perusahaan setelah mereka melakukan pendekatan kepada pemerintah dan masyarakat setempat. Setelah mulai terjalin komunikasi dan relasi serta kolaborasi kegiatan atau menerima usulan kegiatan masyarakat. Selanjutnya melalui pertimbangan internal, perusahaan memutuskan untuk menyetujui, menunda atau membatalkan proposal kegiatan. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang terselenggara dari pemanfaatan alur dana model ini dilakukan dengan menyerahkan LPJ kepada pihak perusahaan atau perusahaan melakukan audit internal.



Gambar 4
Ilustrasi Alur Dana CSR-1 (dari Perusahaan ke Masyarakat).

Rangkaian informasi mengenai fase pendekatan pada intinya memberikan pemahaman kepada kolaborator model bahwa fase ini menjadi media sekaligus prakondisi atas keberhasilan program/kegiatan bersama. Disadari atau tidak, dari alasan pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing kolaborator model dapat dilihat bahwa prinsip saling membutuhkan/melengkapi menjadi pilar penyangga awal dalam hubungan pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, walaupun kadarnya cenderung lebih berat pada warga yang lebih membutuhkan, sementara perusahaan lebih ringan kadarnya. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan terkesan masih melihat bahwa pendekatan hanya merupakan sarana untuk membawakan atau menghantarkan (men-sosialisasikan) suatu program tertentu. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila perusahaan dapat lebih menyadari bahwa mereka juga dapat membutuhkan masyarakat untuk suatu alasan tertentu sebagaimana masyarakat membutuhkan kehadiran perusahaan, sebab dengan prinsip saling membutuhkan/melengkapi yang setara kadarnya pada semua pihak yang terlibat, silaturahmi, koordinasi, dan kerjasama dalam kegiatan tersebut akan dapat didorong pada kemitraan sejati.

Fase *engagement*/pendekatan dalam model awal secara normatif dan secara praktis telah menjadi sebuah tahapan yang mampu menjadi media dalam menjalin relasi dan komunikasi yang dapat memfasilitasi kepentingan, harapan, dan tujuan dari kolaborator model. Pendekatan yang dilakukan telah mampu mengintegrasikan komponen warga dan aparat pemerintah setempat dengan pihak perusahaan. Pada fase ini model yang dirintis oleh penulis dan warga dikomunikasikan kepada pihak perusahaan dengan dilandasi prinsip saling membutuhkan/melengkapi. Warga membutuhkan dukungan sumber, dan seharusnya perusahaan juga membutuhkan warga untuk mendapatkan lebih dari sekedar *corporate branding* (pencitraan) dan lebih jauh sebagai *corporate lisen*ce. Argumen yang mendasari hal tersebut bahwa pada realitasnya

perusahaan ini harus memenuhi unsur penilaian dan evaluasi komprehensif yang dilakukan oleh perwakilan WHO (*World Health Organization*), perusahaan juga mengemban amanat dari hukum positif di Indonesia seperti UU No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU 2007, lebih jauh lagi kinerja perusahaan diatur pula oleh norma operasi CSR profesional dunia usaha dalam ISO 26000: 2010 *Guidelines for CSR*, kesemua ini sejatinya mewajibkan perusahaan untuk benar-benar dapat menjalin simbiosis mutualisme dengan lingkungan sosial di sekitarnya.

Proses perencanaan model awal merupakan jembatan yang memfasilitasi penemuan potensi dan sumber dengan pengidentifikasian masalah serta kebutuhan masyarakat. Fase perencanaan model awal sejatinya telah menjadi persemaian bagi benih-benih kemitraan bukan hanya pada dua sector, yaitu warga maupun perusahaan, tetapi sector ketiga yaitu pemerintah setempat juga turut berkontribusi. Dalam perencanaan model awal dapat diketahui bahwa prosesnya melibatkan warga miskin, representasi elit-elit lokal, dan perusahaan. Jika ada pihak-pihak yang merasa bahwa kapasitas keterlibatan yang lebih besar terletak pada pihak-pihak tertentu, merupakan konsekuensi logis dari rangkap kepengurusan dan cara pandang yang parsial, misalnya perusahaan yang tidak begitu holistik dalam melihat seluruh proses perencanaan dan lebih melihat sebatas pada ajuan proposal kegiatan masyarakat yang diselaraskan dengan program kegiatan mereka.

Pelaksanaan (*action, intervention*) model awal merupakan fase paling penting bukan hanya dilihat dari sejauhmana penulis bersama dengan warga dan mitra kerjasama mengimplementasikan program, tetapi yang jauh lebih penting bahwa fase ini merupakan manifestasi dari komitmen, tanggung jawab, tugas, peran, atau fungsi dari segenap kolaborator model. Fase ini juga menjadi fondasi untuk melihat kesiapan dari seluruh pihak dalam melanggengkan dan mengembangkan model. Fase pelaksanaan

model pada kegiatan praktikum mencakup kegiatan-kegiatan seperti: kunjungan dan pembelajaran lapangan tahap 1, kunjungan dan pembelajaran lapangan tahap 2, pelatihan/praktik budidaya tanaman ekonomi produktif, pendampingan atau monitoring, studi banding, dan evaluasi. Selain untuk pencapaian tujuan model, faktor komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas, peran, dan fungsi masing-masing pihak dijadikan argumen oleh kolaborator model awal untuk melaksanakan model yang telah direncanakan. Komitmen tersebut bukan hanya ditampilkan oleh pengurus TKM untuk menghargai warga miskin selaku penerima manfaat model, tetapi juga ditujukan oleh pengurus TKM kepada perusahaan selaku mitra kerja sama, begitu pula sebaliknya, perusahaan mempunyai komitmen dan tanggung jawab untuk dapat mendukung pelaksanaan model, meskipun dengan argumen tambahan bahwa kegiatan yang dikolaborasikan dengan model sudah dianggarkan oleh perusahaan.

Prinsip kemitraan yang dapat tergambar dari pelaksanaan model awal yaitu saling membutuhkan/melengkapi, memperkuat, dan menguntungkan. Warga membutuhkan, terlengkapi, dan terkuatkan kegiatannya dengan implementasi kegiatan yang merupakan kolaborasi dengan program CSR, begitu pula sebaliknya, perusahaan akan merasa membutuhkan, terlengkapi, dan terkuatkan Program CSR-nya karena ada beberapa kegiatan dalam Program CSR dapat dikolaborasikan dengan kegiatan warga. Kedua pihak yang terlibat dalam model awal disadari atau tidak, merasakan keuntungan dari keterlibatan masing-masing pihak. Hal tersebut menjadi penanda bahwa telah mulai terjalin relasi kemitraan tiga sektor di lokasi penelitian, dalam konteks dan wacana praktik CSR, kemitraan tiga sektor tersebut mengandung makna bahwa kerjasama atau kolaborasi berdasar pada pengalokasian sumber-sumber daya secara efektif dan efisien serta saling melengkapi dan berkaitan pula dengan pencapaian keberlanjutan hubungan dalam model, pembangunan, lingkungan, dan operasional perusahaan sendiri. Oleh karena

itu, hubungan tersebut dapat dipandang sebagai sebuah pendekatan dalam rangka meningkatkan kinerja sinergi manajemen permasalahan sosial, khususnya masalah kemiskinan.

Kesadaran untuk mengembangkan kemitraan tiga sektor selayaknya juga dilandasi dengan alasan utama bahwa operasi perusahaan sejatinya terkait dengan banyak hal di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konsep pemangku kepentingan, diperlukan pemahaman bahwa keterlibatan perusahaan dalam model awal merupakan investasi sosial yang minimal harus dilakukan oleh perusahaan bersama dengan kelompok masyarakat tempat program diselenggarakan/ dikolaborasikan, dengan pemerintah setempat atau dinas/instansi terkait, dan organisasi masyarakat lainnya. Perusahaan dengan kesemua pihak tersebut seharusnya dapat beroperasi dan menjalankan kemitraan tiga sektor. Secara keseluruhan CSR tidak akan mungkin dapat menjawab semua tuntutan dan dinamika perubahan sosial di sekelilingnya. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki konsekuensi logis untuk dapat mendorong dan mendukung tumbuhkembangnya kemitraan tiga sektor yang pada aktualisasinya dimulai dengan pengembangan model awal di lokasi penelitian.

Monitoring (pendampingan) pada model awal dilakukan sepanjang implementasi model dan kegiatan evaluasi merupakan bagian dari desain model awal. Hakikat monitoring dan evaluasi (moneva) pada model awal dapat dimaknai sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dari pelaksana dan penanggung jawab kegiatan/pengurus TKM dalam menjalankan tugas, peran, atau fungsi masing-masing, dan dalam kapasitas sebagai warga penerima manfaat model yang telah diimplementasikan. Dalam kaitannya dengan prinsip kemitraan, pemaknaan akan hal tersebut merupakan manifestasi dari salah satu prinsip kemitraan, yaitu saling melengkapi. Partisipan dari pihak perusahaan lebih menitikberatkan alasan pentingnya kegiatan moneva yang dilakukan dari perspektif yang lebih luas,

bahwa kegiatan moneva merupakan basis pijakan bagi perusahaan untuk dapat melakukan penilaian internal bagi pelaksanaan Program CSR yang selaras dengan target tertentu yang menjadi misi perusahaan, jadi bukan hanya terletak pada model awal kemitraan yang telah dirintis dan dikembangkan bersama dengan warga dan pemerintah Kelurahan Tamansari. Kegiatan moneva secara tidak disadari atau tidak disengaja juga telah menjadi ajang promosi dan media penggalangan perhatian serta dukungan dari pemangku wilayah (Lurah, Camat).

Kekomprehensifan dan keberlanjutan seluruh rangkaian kegiatan dalam model dapat dilihat salah satunya dari keterlibatan masing-masing pihak yang terlibat. Apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam model berpartisipasi secara kontinyu (tidak parsial), maka dapat dikatakan bahwa model telah cukup berhasil dalam mengakomodasi partisipasi aktif dari pelaku (*actors*) model sendiri. Kegiatan moneva merupakan salah satu bagian kegiatan dalam model awal kemitraan yang diarahkan untuk mencapai kekomprehensifan dan keberlanjutan tersebut. Alasan utama memasukkan kegiatan moneva menjadi bagian dari model adalah agar kegiatan dan model serta hubungan atau komunikasi dengan mitra (P.T. Bio Farma) dapat tetap terjalin dengan baik (berkelanjutan). Warga juga beralasan apabila kegiatan dibiarkan tanpa pendampingan (moneva) baik dari mahasiswa/peneliti, pengurus TKM, maupun perwakilan perusahaan, maka kegiatan warga akan mati suri.

Uraian tersebut hanya sebagai penegasan mengenai kegiatan moneva yang bukan saja penting untuk dilakukan, tetapi berharga pula untuk dapat dilakukan dengan menghadirkan partisipasi aktif dari masing-masing pihak yang terlibat dalam model. Hal ini akan semakin memberikan gambaran bahwa pada realitasnya seluruh pihak yang terlibat dalam model awal kemitraan tidak absen dalam prinsip saling melengkapi pada kegiatan moneva. Dari sajian informasi tersebut dapat dicermati secara spesifik bahwa segenap elemen pelaku model,

baik dari unsur pengurus TKM, pemerintah setempat, perwakilan perusahaan, dan warga telah menjalankan tanggung jawab bersama di dalam melaksanakan salah satu bagian dari model awal kemitraan (moneva). Hal yang lebih penting yang layak diinformasikan sesungguhnya terletak pada prinsip kemitraan yang terakomodasi dari pelaksanaan kegiatan moneva, karena pada fase ini sejatinya prinsip kemitraan secara konseptual seperti saling membutuhkan/memerlukan/melengkapi, memperkuat, dan menguntungkan dapat terlengkapi dengan prinsip yang terakhir, yaitu pembinaan dan pengembangan.

Kelemahan kadangkala menjadi sesuatu yang ditutup-tutupi, membuat putus asa atau dalam konteks penyempurnaan model apabila tidak mendapatkan atensi dan respons yang memadai akan dapat berujung pada kegagalan model. Pada konteks pengungkapan kelemahan model awal, kolaborator model secara lugas mengemukakan kelemahan model awal. Obyektivitas mereka menjadi nilai positif yang dapat mendorong pada semakin kuatnya rasa memiliki (*handarbeni*) terhadap model dan rencana penyempurnaan model. Hal ini dapat dikemukakan tanpa alasan, sebab kelugasan partisipan penelitian untuk mengungkapkan kelemahan tersebut dapat dimaknai secara positif pula pada harapan mereka untuk dapat menyempurnakan model. Jika kolaborator model masih memiliki *sense of belonging*, harapan bahwa nantinya model yang disempurnakan dapat dilanjutkan sendiri oleh masyarakat dan mitranya akan menjadi sesuatu hal yang realistis untuk dicapai.

Kelemahan model awal hasil refleksi partisipan penelitian sejatinya dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan lemahnya komunikasi dan informasi mengenai model yang berujung pada kelemahan lainnya pada pengetahuan dan persepsi warga yang salah terhadap model. Aspek kedua, berkaitan dengan lemahnya akses permodalan yang berakibat pada pengembangan usaha warga yang terkendala. Dua aspek kelemahan tersebut dapat dianalogikan sebagai aspek sosial dan

ekonomi, sehingga tidak berlebihan apabila pandangan ini dikomunikasikan kepada kolaborator model untuk dijadikan sebagai basis dalam rencana penyempurnaan model. Pandangan ini direspons secara positif oleh kolaborator model, sehingga akhirnya rencana penyempurnaan model yang diarahkan untuk mengatasi kelemahan tersebut bertema tentang penguatan aspek sosial model awal dan pengupayaan peningkatan manfaat ekonomi yang dapat diraih dengan kegiatan tertentu dari model.

Jika *handarbeni* terhadap model dapat diasumsikan akan mendorong pada kelangsungan model atau pada konteks prinsip *comdev* sebagai prinsip *sustainability*, maka ungkapan partisipan penelitian mengenai kelebihan model awal dapat dianalogikan sebagai akomodasi terhadap prinsip tujuan hasil (*outcome objectives*) dalam praksis *comdev*. Kelebihan atau hasil-hasil yang telah dicapai dan dirasakan dari pelaksanaan model awal sebagaimana diungkapkan oleh para kolaborator model pada hakikatnya dapat dilihat dari enam aspek. Aspek yang pertama yaitu *social consciousness raising* yang ditandai dengan pernyataan partisipan penelitian mengenai bertambah atau meningkatnya wawasan dan ilmu mereka.

Aspek kedua yaitu *empowerment* yang ditandai dengan informasi yang menyebutkan bahwa model telah memberdayakan potensi masyarakat, membuat usaha warga lebih berkembang, membuka lapangan pekerjaan sampingan baru, menambah atau meningkatkan penghasilan, mengurangi pengangguran, dan kegiatan warga terdahulu dapat berlanjut menjadi kegiatan yang bermanfaat pada masa sekarang. Aspek ketiga merupakan kontekstualisasi dari prinsip *outcome objectives* itu sendiri, dapat dilihat dari pernyataan bahwa tujuan model dapat tercapai dengan lancar dan sukses. Aspek keempat adalah *outreach* atau *accessibility* model yang membuat relasi dan jaringan usaha bertambah sebagaimana dinyatakan oleh partisipan penelitian. Aspek kelima adalah *advocacy* saat pelaksanaan model awal warga

mendapatpendampingan. Aspek keenam atau terakhir yaitu *tactical* atau taktis saat model dapat terarah dan terintegrasi dengan kegiatan mitra, dan dalam sudut pandang *comdev*, aspek ini merupakan implementasi dari prinsip kerjasama dan konsensus serta menghubungkan yang global dan lokal. Semua aspek kelebihan model awal dalam perencanaan penyempurnaan diupayakan untuk dapat dipertahankan, minimal dipertahankan dengan implementasi kegiatan yang konsisten, selaras atau memperkuat kegiatan sebelumnya.

Pengungkapan kebutuhan pengembangan model awal pada hakikatnya selaras dan mengakomodasi prinsip visi dalam praksis *comdev*. Visi tersebut dapat dilihat dari paparan partisipan penelitian yang dapat penulis klasifikasikan ke dalam tiga kategori sifat visi pengembangan model. Visi pertama bersifat *tactical* yang mengisyaratkan dan mengarahkan perbaikan, penyempurnaan, atau pengembangan model kepada implementasi kegiatan praktis, seperti: penyelesaian kegiatan yang belum terlaksana, pelatihan, pendirian Rumah Jamur, dan pengadaan etalase untuk produk olahan jamur. Visi kedua lebih bersifat atau berhubungan dengan tata kelola (*management*) pelaksana kegiatan (TKM) yang ditunjukkan dengan kebutuhan untuk melakukan reorganisasi kepengurusan TKM dan manajemen pelaksanaan model yang ditandai dengan kebutuhan untuk dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan, baik yang dilakukan oleh pelaksana TKM maupun oleh mitra kerjasama. Visi kedua bersifat *partnership improvement* antara masyarakat dan perusahaan yang dapat dilihat dari kenyataan kebutuhan untuk mempermudah birokrasi, sinergi atau harmonisasi antara aspirasi warga dan program atau kegiatan perusahaan, serta pengintensifan komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak. Visi ketiga yaitu *diversity* yang diungkapkan oleh partisipan penelitian dengan kebutuhan akan diversifikasi usaha.

Kelemahan model adalah basis hakiki dalam perencanaan penyempurnaan, tetapi kelebihan

model yang diupayakan dapat dipertahankan atau ditingkatkan beserta kebutuhan pengembangan dengan ketiga visi tersebut sejatinya sama sekali tidak dibawahkan dalam perencanaan penyempurnaan model, karena pada dasarnya visi-visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kegiatan yang diarahkan untuk mengatasi kelemahan model awal. Telaah penulis terhadap kelemahan, kelebihan, dan visi pengembangan model sejatinya dimaksudkan untuk memberi dukungan bagi kesepakatan masyarakat, pemerintah setempat, dan pihak perusahaan dalam menyempurnakan model awal dengan pola baru, yaitu Model Kemitraan Sosial Ekonomi. Dalam penyempurnaan model segala macam hal yang bermanfaat dan dapat dimobilisasi untuk mendukung penyempurnaan diungkapkan oleh kolaborator model dan dapat dicermati bahwa beraneka ragam potensi dan sumber yang dapat mendorong keberhasilan dalam penyempurnaan model sejatinya berada dalam lingkup kolaborator model itu sendiri, yaitu masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Potensi dan sumber yang berasal dari sektor masyarakat ditunjukkan dalam kesediaan dan komitmen untuk serius menekuni usaha, potensi dan sumber yang berasal dari sektor pemerintah ditunjukkan dalam dukungan dari pemerintah setempat dan dalam akses masyarakat kepada narasumber/pemateri kegiatan pelatihan, potensi dan sumber yang berasal dari sektor perusahaan ditunjukkan dalam kesediaan dan komitmen untuk bekerja sama dan memfasilitasi kegiatan tertentu dalam model.

Potensi dan sumber dari ketiga sektor kemitraan tersebut sejatinya telah teridentifikasi sejak masa praktikum, tetapi dengan paparan informasi yang *ajeg* atau konsisten dari kolaborator model sampai dengan penelitian ini dilakukan, maka hal tersebut dapat dikatakan pada pernyataan bahwa sesungguhnya seluruh kolaborator model sadar jika relasi kemitraan tiga sektor merupakan kunci dalam merintis dan menyempurnakan model. Hal ini selaras dengan apa yang telah penulis bahas

sebelumnya bahwa prinsip kemitraan telah tersemai melalui implementasi model awal, sehingga perencanaan penyempurnaan model dalam koridor kemitraan tiga sektor diarahkan untuk melihara dan meningkatkan. Potensi dan sumber dari pengembangan akses dan kerjasama ketiga sektor kemitraan selaras dengan pendapat Talcott Parsons mengenai teori sistem fungsional struktural yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis terdiri dari organ-organ yang saling bergantung (interdependensi). Ketersalinggantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi logis agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup dan sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan *structural functional* ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial (*social order*). Saling ketergantungan pada konteks model kemitraan, dapat dilihat dari potensi dan sumber berupa akses serta kerjasama antara ketiga sektor kemitraan, dan kontekstualisasinya di lapangan, masyarakat lokal bergantung pada asistensi perusahaan yang praktik CSR-nya dijadikan sebagai media penumbuhkembangan relasi dan model kemitraan.

Masyarakat juga bergantung kepada pemerintah setempat yang memberikan dukungan administratif dan politis bagi kelangsungan relasi dan model kemitraan yang dikembangkan dengan perusahaan. Perusahaan juga bergantung kepada masyarakat dan pemerintah lokal dalam kapasitasnya sebagai medium atau wilayah praktik dalam mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Pihak pemerintah setempat juga bergantung bukan hanya secara *de facto* melainkan secara *de jure* mewujudkan *social order* di wilayah administratifnya, salah satunya dengan mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan masyarakat, meskipun demikian bergantung pula terhadap asistensi pihak perusahaan yang mengkolaborasikan Program CSR dengan Tujuh Program Prioritas Pemerintah Kota Bandung.

Penelitian ini selain memotret dan mengupas model awal yang bertajuk “Pengembangan Kemitraan Antara Warga dengan P.T. Bio Farma untuk Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Kelurahan Tamansari”, juga membahas “Model Kemitraan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Perusahaan untuk Mengatasi Kemiskinan” sebagai penyempurnaan model awal tersebut? Tahap *engagement* dalam model awal menurut identifikasi dan pencermatan penulis dipersepsikan secara berbeda oleh dua pihak utama yang terlibat dalam relasi dan kerja sama kemitraan. Perbedaan persepsi tersebut selain berujung pada kadar *trust* yang lemah dalam relasi dan model kemitraan, juga mengantarkan fase pendekatan yang dilakukan oleh kedua pihak terkesan kurang sehat karena pendekatan yang dilakukan berdasar kepentingan sesaat atau diistilahkan sebagai *asal butuh, hit and run*, atau *kiss and run*. Hal ini dapat dimaklumi mengingat perusahaan bersangkutan realitasnya memang baru saja meluncurkan Program CSR di Kelurahan Tamansari.

Hal tersebut menjadi sebuah kewajaran bagi pendekatan perusahaan yang dilakukan terhadap warga dan pemerintah setempat yang lebih difokuskan pada penyebarluasan Program CSR. Persepsi warga juga tidak boleh disalahkan, sebab dalam kondisi yang sulit dan terhimpit kemiskinan, segala macam celah, potensi, atau sumber apapun yang dipandang dapat membuka jalan bagi perbaikan, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan, layak dipertimbangkan dan diambil. Pada penyempurnaan model, khususnya dalam tahap pendekatan, semangat dan tindakan nyata untuk memperbaiki kinerja pendekatan telah dilaksanakan oleh kedua pihak dengan meningkatkan relasi, komunikasi, dan koordinasi. Kinerja pendekatan yang lebih baik dalam penyempurnaan model telah ditunjukkan bukan hanya dua sektor yaitu masyarakat dan perusahaan, tetapi pemerintah setempat sebagai sektor ketiga dalam relasi dan model kemitraan turut memfasilitasi peningkatan kinerja pendekatan tersebut. Pemerintah Kelurahan Tamansari selaku *stakeholder* setempat telah berkomitmen untuk menjembatani pendekatan

dari sektor masyarakat dan perusahaan secara proporsional.

Pihak perusahaan dalam upaya peningkatan kinerja pendekatannya terhadap warga dan pemerintah lokal telah berusaha untuk lebih terbuka dan aktif dalam merespons dinamika masyarakat. Sektor masyarakat juga tidak ketinggalan untuk meningkatkan kinerja pendekatan yang mereka lakukan kepada perusahaan, yang ditunjukkan dengan upaya-upaya mereka, seperti dalam: mengedepankan *trust* atas komitmen yang pernah dibuat dengan perwakilan perusahaan, distribusi peran warga dalam melakukan pendekatan kepada perusahaan, dan dalam pengintensifan pendekatan terhadap personil perusahaan tertentu yang dianggap paling dapat memfasilitasi kepentingan warga secara proporsional. Semua uraian tersebut mengantarkan pada pemahaman bahwa penyempurnaan model pada tahap *engagement*/pendekatan telah berhasil mengarahkan relasi dan model kemitraan sebagai dua hal yang berbeda tetapi satu, dengan ungkapan lain, relasi sosial tiga sektor tersebut menjadi fondasi bagi tumbuhnya model sekaligus juga menjadi media bagi penyempurnaan model kemitraan.

Penyempurnaan model pada tahap perencanaan diupayakan dengan meningkatkan intensitas pertemuan pihak utama dalam model kemitraan yaitu masyarakat dan perusahaan. Pertemuan dalam rangka merencanakan penyempurnaan model tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan relasi dan kerja sama saling membutuhkan, bukan “asal butuh” atau parsial. Pihak perusahaan sejatinya juga sangat berkepentingan dengan kegiatan ini, dengan kenyataan bahwa perusahaan sejatinya tidak mungkin bisa menemukan kebutuhan masyarakat secara tepat apabila mereka tidak turun langsung atau terlibat dalam perencanaan kegiatan masyarakat. Hal tersebut penulis kemukakan dengan argumen bahwa penemuan kebutuhan masyarakat pada akhirnya pasti akan berimplikasi pada pelaksanaan Program CSR mereka. Realitas tersebut dapat menjadi faktor pendorong yang

sangat kuat bagi perusahaan pada keterlibatannya dalam perencanaan penyempurnaan model. Oleh karena itu, komitmen perusahaan untuk mendukung pelaksanaan penyempurnaan model juga dapat dimaknai sebagai pergeseran perspektif dalam prinsip implementasi program, dari semula pasif kolaboratif menjadi aktif kolaboratif dengan menjaring aspirasi dari level *grass root*.

Pergeseran paradigma perencanaan program dari pasif kolaboratif menuju aktif kolaboratif juga tampak dari upaya warga dalam mencari akses calon pemateri kegiatan Pelatihan UKM dengan mencari informasi di Kantor Dekopinda Kota Bandung. Penanda lainnya yaitu pengetahuan warga pada desain penyempurnaan model yang lebih komprehensif apabila dibandingkan dengan pengetahuan mereka pada desain model awal. Pergeseran paradigma tersebut juga menyentuh pihak pemerintah lokal dan ditandai dengan mekanisme perencanaan penyempurnaan model yang meluas dan menyentuh kewenangan *stakeholders* setempat, seperti Lurah dan Camat. Hal tersebut ditandai pula dengan peran aktif pemerintah setempat dalam mengkomunikasikan dan menggalang dukungan dari pihak perusahaan mengenai rencana penyempurnaan model.

Kelemahan model awal secara umum berkaitan dengan kegagalan kolaborator model untuk dapat melaksanakan seluruh rencana kegiatan dengan masih menyisakan sebuah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, yaitu Pelatihan UKM. Penyempurnaan model yang berkaitan dengan fase pelaksanaan secara spesifik merespons kelemahan model awal dan dikembangkan lagi menurut agenda masyarakat. Penyempurnaan model tahap pelaksanaan dapat dimaknai pada telah terintegrasinya inisiatif dan partisipasi aktif dari segenap kolaborator model. Inisiatif kolaborator model terakomodasi dengan terumuskannya desain penyempurnaan model yang digagas langsung dan disepakati bukan oleh satu pihak tertentu, tetapi oleh seluruh representasi tiga sektor kemitraan. Semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan juga sudah

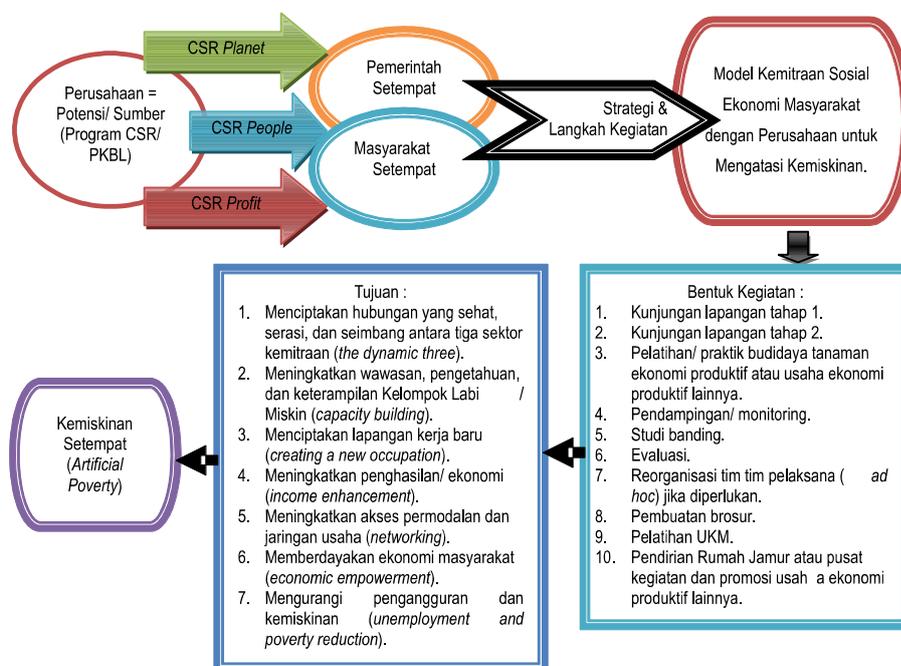
dipahami oleh seluruh kolaborator sebagai satu kesatuan Model Kemitraan Sosial Ekonomi, dan bukan lagi dipahami sebagai kegiatan-kegiatan yang terpisah atau “menumpang” pada mitra (P.T. Bio Farma).

Moneva pada model yang disempurnakan meskipun bukan menjadi bentuk kegiatan sebagaimana halnya pada model awal, tetapi dalam kapasitasnya sebagai tahapan model kenyataannya dalam penelitian ini diletakkan dalam posisi yang tinggi dan setara dengan ketiga tahapan sebelumnya (pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan). Hal ini dilandasi dengan kenyataan bahwa *moneva* adalah sebuah fase yang akan sangat menentukan keberlanjutan model. Argumen tersebut penulis kemukakan untuk mengarahkan kepada pemahaman mengenai perlunya penyempurnaan model pada fase *moneva*, yang pada model awal merupakan tahapan sekaligus bentuk kegiatan. Dalam konteks penelitian ini, telah teridentifikasi kelemahannya yaitu berkaitan dengan perspektif pihak perusahaan yang masih melihat *moneva* secara parsial, ketika perusahaan melihat *moneva* bukan satu kesatuan dalam model awal, melainkan melihatnya sebagai rutinitas internal perusahaan yang terpisah dengan *moneva* yang dilakukan oleh masyarakat.

Penyempurnaan model yang dilakukan pada tahap *moneva* pada akhirnya memberi implikasi pada ketiga sektor kemitraan. Perusahaan telah bergeser perspektifnya dalam melihat *moneva* dengan mulai meletakkan *moneva* sebagai rangkaian kegiatan dalam model kemitraan dengan masyarakat, bukan atas inisiatif dari satu pihak tertentu dan bukan aksi rutin internal perusahaan belaka. Hal tersebut ditandai dengan kesadaran dari perusahaan yang memandang bahwa *moneva*, baik sebagai fase maupun sebagai bentuk kegiatan merupakan media penentu bagi keberlanjutan model kemitraan sendiri. Kesadaran tersebut pada realitasnya bukan hanya milik perusahaan, melainkan menyentuh pula warga, pengurus TKM, tokoh masyarakat, dan pemangku wilayah di lokasi tersebut. Jadi

dapat dikemukakan, bahwa penyempurnaan model dalam tahap *moneva* telah meningkatkan kesadaran segenap kolaborator model kemitraan akan urgensi melakukan *moneva*, walaupun kesadaran pemangku wilayah selaku kolaborator model dari sektor pemerintah

seringkali diapresiasi dan direalisasikan secara insidental. Model akhir selanjutnya dapat diilustrasikan sebagai berikut pada gambar 5.



Gambar 5
Ilustrasi Model Akhir

Gambar 5 merupakan ilustrasi atas Model Kemitraan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Perusahaan untuk Mengatasi Kemiskinan yang diformulasikan dengan berlandaskan pada pengembangan potensi dan sumber lokal yang berupa akses terhadap Program CSR dalam tiga bidang, yaitu lingkungan (planet), sosial (people), dan ekonomi (profit). Model ini selain mensyaratkan adanya relasi dan kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan, tetapi juga menuntut peran pemerintah setempat sebagai regulator. Pekerja sosial komunitas selaku pendamping masyarakat atau fasilitator mengakomodasi relasi dan kerjasama tiga sektor tersebut dalam mendesain model yang dimungkinkan terkreasi melalui aplikasi strategi dan langkah-langkah kegiatan seperti: 1) community and stakeholders involvement, 2) diferensiasi lapisan sosial lokal, 3) asesmen

potensi dan sumber, 4) asesmen masalah dan kebutuhan, 5) penyusunan desain model, 6) konsultasi desain model, 7) diseminasi model 8) koordinasi intensif tiga sektor. Model dalam sepuluh bentuk kegiatan tersebut diimplementasikan melalui kolaborasi aktif ketiga sektor kemitraan dan diarahkan untuk mencapai tujuh tujuan model yang diharapkan mampu merespons dan mengatasi masalah kemiskinan setempat.

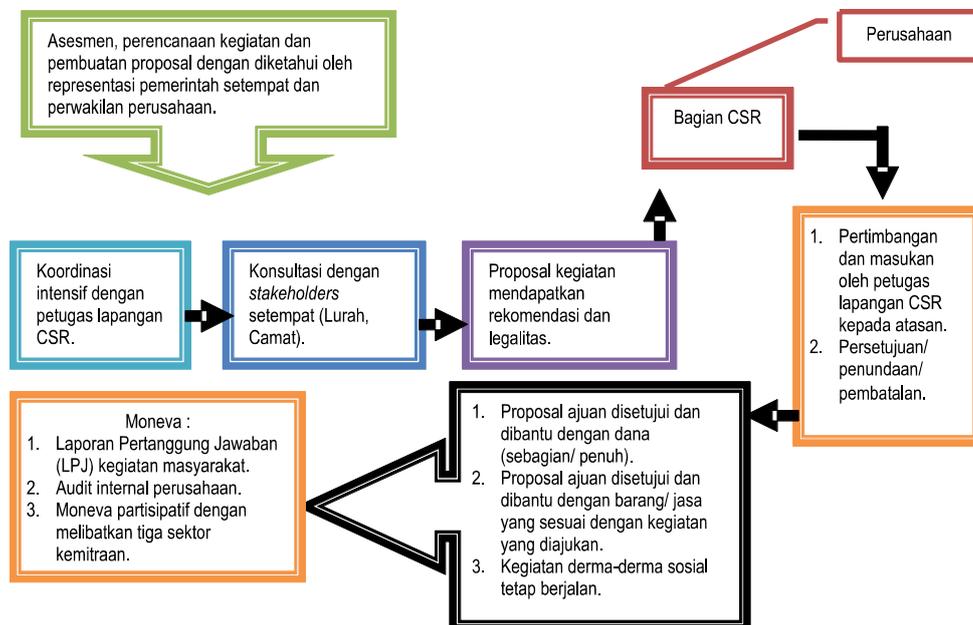
Model Kemitraan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Perusahaan pada akhirnya cukup mampu untuk mendukung dan menguatkan hipotesis penelitian tindakan ini. Kemiskinan perkotaan di Kelurahan Tamansari yang sebagian merupakan masalah terhambatnya partisipasi sosial karena kekurangan materi dan sumberdaya (*artificial poverty*) dapat

diupayakan pengatasannya dengan peran pekerja sosial komunitas sebagai pendamping masyarakat dalam mengembangkan akses,

relasi, dan kerjasama kemitraan berbasis pada program CSR.

Model Kemitraan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Perusahaan pada akhirnya juga dapat memberi sedikit pencerahan pada bagaimana memanfaatkan akses dana Program CSR bagi kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan yang diarahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Bagan berikut adalah ilustrasi mengenai alur (prosedur) pemanfaatan dana CSR dalam mendukung penyusunan dan pelaksanaan model akhir.

Gambar 6 menyuguhkan informasi mengenai mekanisme atau alur dana Program CSR yang berdasar atas inisiatif lokal sebagaimana halnya dengan dana yang dikelola pada proses penyempurnaan Model Kemitraan Sosial



Ekonomi di Kelurahan Tamansari. Alur dana CSR model ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan

Gambar 6. Ilustrasi Alur Dana CSR-2 (Dari Masyarakat ke Perusahaan).

sepengetahuan atau dengan kehadiran aparat pemerintahan setempat dan perwakilan perusahaan pada saat melakukan asesemen, perencanaan kegiatan, dan penyusunan proposal. Setelah proposal tersusun, kegiatan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi intensif dengan perwakilan perusahaan yang dilanjutkan dengan konsultasi dan permohonan legalitas dari stakeholders setempat. Setelah itu proposal diajukan dan proses selanjutnya hampir sama dengan Alur Dana CSR-1, hanya pencairan proposal lebih terfokus serta tidak cukup dikolaborasikan atau disubstitusikan, dan moneva juga dilakukan secara integral.

Simpulan

Kemiskinan di lokasi penelitian diistilahkan sebagai kondisi *sangsara* yang mencakup sembilan aspek kehidupan kelompok miskin dan dapat didiskripsikan melalui 11 ciri atau

indikator serta disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Jenis kemiskinan tersebut secara konseptual disebut sebagai *artificial poverty* atau kemiskinan palsu/semu, yaitu suatu kondisi miskin yang masih dapat diusahakan pengatasannya dengan cukup mudah, memanfaatkan potensi dan sumber yang ada/tersedia dan dapat diakses oleh kelompok miskin. *Artificial poverty* berangkat dari perspektif kekuatan dan dilandasi dengan analisis terhadap aspek-aspek yang mencakup: ketidakmenentuan pendapatan, lingkungan fisik dan kepemilikan aset, asumsi lokal, dan faktor-faktor buatan manusia.

Kemiskinan tersebut diupayakan pengatasannya dengan memanfaatkan potensi akses terhadap Program CSR P.T. Biofarma yang dibingkai dalam model kemitraan. Pada awal perjalanan, model kemitraan baru dapat mencakup relasi dan kerjasama sosial. Hal ini didorong oleh faktor pilihan program dari perusahaan yang bersubstansi pada kegiatan derma sosial (*charity*), pada pelaksanaan CSR-nya seperti: tumpang tindih dengan praktik

sosial dari Program Bina Lingkungan (BL) dalam PKBL, “tindakan curang perusahaan”, dan belum dilandasi *trust* sejati dengan masyarakat penerima, sehingga pola kemitraan yang tercipta baru sebatas pada aspek sosial. Dengan segenap kelemahan implementasi Program CSR tersebut, kegiatan dalam model awal tetap seoptimal mungkin diarahkan pada peningkatan kapasitas kelompok miskin dalam upaya untuk mentas dari kondisi miskin mereka.

Perencanaan perbaikan atau penyempurnaan model secara partisipatif diarahkan untuk mengatasi kelemahan model awal dan ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan model. Pertimbangan- dalam memformulasikan desain penyempurnaan program terakumulasi dalam desain program yang diarahkan pada penguatan aspek sosial kemitraan dan penciptaan kemitraan ekonomi dalam relasi dan kerjasama yang telah dijalin oleh warga, pemerintah setempat, dan pihak perusahaan. Kegiatan yang dianggap mampu menjawab tantangan tersebut yaitu: Reorganisasi Pengurus TKM, Pembuatan Brosur, Pelatihan UKM, dan Pendirian Rumah Jamur yang selanjutnya disusun dan dilaksanakan dalam Model Kemitraan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Perusahaan untuk Mengatasi Kemiskinan. Model akhir dalam praktik secara umum telah mampu mengakomodir relasi kemitraan tiga sektor yaitu warga, pemerintah setempat, dan perusahaan.

Model dalam segala keterbatasannya juga menjadi media persemaian bagi prinsip kemitraan seperti saling membutuhkan/ memerlukan/ melengkapi, memperkuat, menguntungkan, serta pembinaan dan pengembangan. Hasil umum dari pelaksanaan keseluruhan rangkaian model, seperti: kunjungan lapangan tahap 1 dan 2, pelatihan/praktik budidaya tanaman ekonomi produktif, pendampingan/ monitoring, studi banding, evaluasi, Reorganisasi Pengurus TKM, Pembuatan Brosur, Pelatihan UKM, dan Pendirian Rumah Jamur, yaitu peningkatan kesadaran sosial, jiwa wirausaha, dan

penghasilan masyarakat. Berbasis hal tersebut sangat wajar apabila pola kemitraan tiga sektor yang telah terjalin dan memperkaya aspek implementasi CSR dari sisi prosedur dapat diapungkan sebagai pola baru yang dapat memfasilitasi kebijakan terbatas pihak perusahaan, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan masyarakat.

Model Kemitraan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Perusahaan untuk Mengatasi Kemiskinan dengan segenap keterbatasan dan kelebihan dipromosikan kepada pihak, antara lain kepada: 1) BUMN P.T. Bio Farma Persero atau perusahaan lain yang sejenis agar dapat kembali kepada fitrahnya yaitu dengan PKBL, agar aspek pemberdayaan ekonomi lokal benar-benar dapat terakomodir secara normatif, profesional, proporsional, dan berkelanjutan, jadi operasional perusahaan bukan hanya semata-mata untuk *profit*, namun juga dapat memberikan *benefits* kepada masyarakat di sekitarnya 2) Perusahaan-perusahaan swasta yang mengimplementasikan CSR agar dapat mempertimbangkan untuk membuat klasifikasi kelompok-kelompok miskin dalam tiga kelompok sasaran Program CSR yaitu: *the poorest* atau Laba (Layak Bantu) seperti kelompok jompo atau penyandang cacat non-produktif yang dijadikan sebagai sasaran dari derma sosial Program CSR, *artificial poverty*

group atau *economically active poor* atau Labi (Layak Bina/Layak Berusaha) yang dijadikan sebagai sasaran program penguatan kapasitas (sosial) dan pemberdayaan ekonomi dengan perluasan akses dan pemberian pinjaman modal kemitraan Program CSR, dan Layak Bersaing (Labe) yang dijadikan sebagai sasaran dari Program CSR dalam kegiatan pendampingan, pengawasan, dan pemandirian Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 3) Kepada peneliti, aktivis, dan praktisi dalam pengembangan masyarakat yang hendak mereplikasi model, disarankan untuk secara cermat mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik wilayah dan masyarakat serta dukungan dari pemerintah setempat dan akses terhadap Program CSR suatu perusahaan tertentu yang selaras dengan apa yang telah penulis kembangkan di Kelurahan Tamansari agar replikasi dapat berjalan sesuai harapan dan tujuan model. 4) Peneliti, aktivis, dan praktisi dalam pengembangan masyarakat yang hendak melanjutkan penelitian yang telah dilakukan penulis, disarankan untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan format atau metode penelitian yang digunakan dengan misalnya metode kuantitatif atau lebih jauh dengan metode *research and development* agar pengembangan model nantinya benar-benar dapat teruji (*feasible*), *reliable*, dan *sustainable*.

Daftar Pustaka

- Agus Riyanto. September 2011. PKB: *Ragam Derma Sosial BUMN*. Jakarta: Banana Publisher. Cetakan pertama.
- Budi Wibhawa, dkk. Juli 2011. *Social Entrepreneurship, Social Enterprise, Corporate Social Responsibility: Pemikiran, Konseptual, dan Praktik*. Bandung: Widya Padjadjaran. Cetakan pertama.
- Du Bois, Brenda and Karla Krogsrud Miley. 2005. *Social Work: An Empowered Profession*. USA: Pearson. Fifth edition.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero. September 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Edisi ketiga. Cetakan kesatu.
- Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial. Juni 2006. *Kemiskinan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS Press. Volume 5. No. 1.

Moser, Caroline. 1998. *The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction*. World Development. Volume 26. No.1.

Netting, F. Ellen. Peter M. Kettner, and Steven L. McMurtry. April 2001. *Praktek Makro Pekerjaan Sosial*. New York: USA: Longman. Edisi terjemahan.

<http://www.biofarma.co.id>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2012.

‘